

**PERANAN SEKOLAH
DALAM PROSES SOSIALISASI POLITIK**

(Studi Penelitian terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

**oleh:
SIHABUDIN ZUHRI
NIM D4B007035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2010**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS



Sertifikat

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sihabudin Zuhri menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Sihabudin Zuhri

23 Pebruari 2010

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

PERANAN SEKOLAH DALAM PROSES SOSIALISASI POLITIK (Studi Penelitian terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)

Yang disusun oleh Sihabudin Zuhri, NIM D4B007035
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Pebruari 2010
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji Lain

1. Dr. Kushandajani, MA

Drs. Priyatno Harsasyo, MA
Sekretaris Penguji :

2. Drs. Moh. Adnan, MA

Dr. Reni Windiani, MS

Semarang, 23 Pebruari 2010
Praogram Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

MOTTO

Anggulawentah siswa bakal andadekake manungsa kang
mardika batine, mardika pikirane saha mardika awake
(Ki Hajar Dewantara)

Ilmu itu lebih bermanfaat dari pada harta,
Ilmu dapat menjaga diri dan harta tidak bisa menjaga pemiliknya
Ilmu itu seperti hakim dan harta itu adalah yang terhukum
Harta itu berkurang jika dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah jika diamalkan
(Ali Bin Abi Thalib)

Tolabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat
(Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat)
(Hadits Rasulullah SAW)

Ukuran tubuhmu tidak penting. ukuran otakmu cukup penting,
tapi ukuran hatimu itulah yang terpenting

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis ini kepada....

- Istri tercinta Suwarsi, S.Pd
- Anak-anak tersayang
 - Miftakhul Muslikhah Zuhri
 - Nur Muttaqien Zuhri
 - Makhfud Sholahudin Zuhri

ABSTRAKSI

PERANAN SEKOLAH DALAM PROSES SOSIALISASI POLITIK (Studi penelitian terhadap siswa SMA Negeri 2 Semarang)

SMA Negeri 2 Semarang memiliki peranan yang penting dan fundamental di dalam proses sosialisasi politik pada peserta didik. Proses sosialisasi politik merupakan proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan baik didalam masyarakat, menjadi warga negara yang baik serta mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan bagian dari proses sosialisasi politik baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mendapatkan gambaran tentang proses sosialisasi politik dan kunci pelaksanaan sosialisasi politik di SMA Negeri 2 Semarang dapat dilihat dari sosialisasi politik secara langsung berupa pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Sedangkan sosialisasi politik secara tidak langsung dengan cara magang menjadi anggota organisasi yang ada di Sekolah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **deskriptif kuantitatif**, sedangkan untuk mendapatkan informasi data penelitian, penulis menggunakan teknik **sampling berimbang** (*proportional sampling*). Sampling berimbang selalu dikombinasikan dengan teknik lain yang berhubungan dengan populasi yang tidak homogen. Kata “ berimbang “ menunjuk pada ukuran jumlah yang tidak sama, disesuaikan dengan jumlah anggota tiap-tiap kelompok yang lebih besar.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang menjadi poin-poin penting pada proses sosialisasi politik terhadap siswa SMA Negeri 2 Semarang : *Pertama*, proses sosialisasi politik secara langsung melalui metode pembelajaran politik yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. Proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan dan keterlibatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengekspresikan ide, gagasan dan kreativitasnya melalui diskusi, presentasi, debat dan studi kasus yang berkaitan dengan politik. Hasil yang diperoleh selain pengetahuan politik juga keterampilan kewarganegaraan dengan mendemonstrasikan organisasi politik yang dibentuknya dan mendemonstrasikan tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu. *Kedua*, proses sosialisasi politik secara tidak langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melalui pengembangan diri baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, PASKIBRA, PMR dan lain sebagainya. Dengan magang atau belajar berorganisasi di sekolah, diharapkan nantinya akan berpengaruh positif pada peserta didik ketika beraktivitas dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan politik secara langsung. *Ketiga*, pembelajaran sosialisasi politik membuat siswa memiliki sikap yang demokratis.

Penelitian ini tentunya memiliki kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Misalnya, melaksanakan program pembelajaran politik di luar sekolah baik pada lembaga-lembaga politik maupun pada lembaga/instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan sebagai agenda penelitian mendatang.

Kata Kunci: *Sosialisasi Politik, Pembelajaran Inovatif dan Magang menjadi anggota organisasi sekolah*

ABSTRACT

ROLE OF SCHOOL IN POLITICAL SOCIALIZATION PROCESS

(The Study of State Senior High School 2nd Semarang)

The State Senior High School 2nd Semarang has an important and fundamental role in the political socialization process on its students. Process of political socialization is the process that helps individual development become social beings who can adapt well in society, be good citizens and understand the rights and obligations as citizens. School is a place where an educational and political socialization process are directly and indirectly held. The description of the political socialization process at State Senior High School 2nd Semarang has been conducted through an active, creative, innovative and fun learning. While the political socialization process can be indirectly seen through extracurricular program.

The researcher used *descriptive quantitative* as a method of the research and *balanced sampling (proportional sampling)* as a technique to gain the data. Balanced sampling is always combined with other techniques in correlation to the population that is not homogeneous. The word “balanced” means different numbers adjusted by the number of greater members of each group.

Research results show that there are some important things in the process of political socialization of students at State Senior High School 2nd Semarang. The first, political socialization process is directly seen through the active, creative, innovative and fun learning methods in politics. The learning process is done by providing a lot of opportunities and participation to students in expressing their ideas through discussion, presentation, debate and case studies related to politics. The students obtain political knowledge and citizenship skills through the demonstration of forming political organization and practicing how to use the right in general election. The second, political socialization process is indirectly seen through extracurricular programs, such as: OSIS, MPK, ROHIS, Paskibra, PMR and others. The students gain the organization skills that can be implemented in the real political organization. The third, students have a democratic attitude through political learning.

This research certainly has drawbacks that can not be ignored, such as implementing the political program of learning outside the school -- political institutions and institutional / government. Therefore, further research is needed as a future research agenda.

Keyword: *Political socialization, innovative learning and being a member of school organization*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang panutan hidup Rasulullah Muhammad SAW, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi politik". Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Purwoko, MS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Priyatno Harsasto, MA., selaku dosen pembimbing I yang banyak membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Terima kasih untuk segala waktu, dorongan, dukungan, pengarahan serta kesempatan untuk berbagi pengetahuan.
3. Ibu Dr. Reni Windiani, MS., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi, semangat, pengarahan serta dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan tesis.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Drs. Puji Tikno, MM selaku Kepala SMA Negeri 2 Semarang yang telah memberikan kesempatan dan izin studi, memberi dukungan moral serta mengizinkan untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Semarang

6. Seluruh staf pengajar SMA Negeri 2 Semarang yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan studi.
7. Seluruh responden (Siswa) SMA Negeri 2 Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Istriku tercinta Suwarsi, S.Pd, yang telah memberi semangat, doa dan dukungan yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Putra-putriku, Miftakhul Muslikhah Zuhri, Nur Muttaqien Zuhri dan Makhfudz Shalahudin Zuhri yang menjadi supporter dan inspiras abadiku. Kalian adalah sumber semangat yang mengingatkanku untuk selalu menjadi ayah yang baik, belajar tidak mengenal usia (long live education), rajinlah belajar, teladanilah ayahmu.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan *spirit* yang luar biasa di setiap waktu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritik masih diperlukan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat-Nya bagi kita semua.

Semarang, 23 Februari 2010

Penulis,

Sihabudin Zuhri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.3.1. Tujuan Penelitian	15
1.3.2. Manfaat Penelitian	15
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Sosialisasi Politik	17
2.1.1 Konsep Sosialisasi Politik	17
2.1.2 Pentingnya Sosialisasi Politik	20
2.1.3 Mekanisme Sosialisasi Politik	21
2.1.4 Sosialisasi Politik Orang Dewasa	22
2.1.5 Sosialisasi Politik dan Kesadaran Politik Remaja	23
2.1.6 Jenis Sosialisasi Politik	25
2.1.7 Proses Sosialisasi Politik	26
2.1.8 Agen Sosialisasi Politik	31
2.2. Kebudayaan Remaja sebagai Pemilih Pemula	37

2.3.	Perilaku Politik	39
2.4.	Definisi Konsep dan Operasional	41
2.4.1	Definisi Konsep	41
2.3.2.	Definisi Operasional	43
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Desain Penelitian.....	47
3.2.	Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	47
3.3.	Populasi dan Sampel	48
3.3.1	Populasi	48
3.3.2	Sampel	49
3.4.	Teknik Penentuan Sampel Responden	49
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	51
3.6.	Teknik Analisa Data.....	52
BAB IV	ANALISA DATA	
4.1.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	53
4.1.1	Sejarah Singkat SMA Negeri 2 Semarang.....	53
4.1.2	Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang.....	58
4.1.3	Struktur dan Muatan Kurikulum	74
4.1.4	Pengembangan Diri.....	93
4.1.5	Program Pengembangan Diri.....	96
4.2.	Proses dan Analisa Data	109
4.2.1	Gambaran Responden	109
4.2.2	Analisa Data.....	111
4.2.3	Proses Sosialisasi Politik	158
4.2.4	Sikap Demokratis Hasil Sosialisasi Politik	166
BAB V	SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	170
5.1.	Simpulan	170
5.2.	Implikasi Kebijakan	174
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	175

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Daftar Siswa Klas XI Tahun Pelajaran 2009/2010 48
Tabel 3.2	Rekapitulasi Populasi Primary Sampling Unit (PSU) Klas XI Siswa SMA Negeri 2 Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010 51
Tabel 4.1	Struktur Program Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang Klas X Tahun Pelajaran 2009/210..... 81
Tabel 4.2	Struktur Program Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang Klas XI dan XII Program IA Tahun Pelajaran 2009/210 83
Tabel 4.3	Struktur Program Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang Klas XI dan XII Program IS Tahun Pelajaran 2009/210 85
Tabel 4.5	Responden Berdasarkan Umur..... 109
Tabel 4.6	Responden Berdasarkan Jenis kelamin 110
Tabel 4.7	Responden Berdasarkan Agama 111
Tabel 4.8	Informasi Isu-isu Politik dari Keluarga..... 111
Tabel 4.9	Mendiskusikan isu-isu Politik dengan Keluarga..... 112
Tabel 4.10	Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga 113
Tabel 4.11	Memutuskan Masalah Dalam Keluarga 114
Tabel 4.12	Mendiskusikan pelajaran yang berkaitan dengan politik di Sekolah 115
Tabel 4.13	Tingkat Aktifitas Organisasi di Sekolah 116
Tabel 4.14	Tema-tema Politik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah 117
Tabel 4.15	Membaca Surat Kabar..... 118
Tabel 4.16	Mengikuti Berita Politik melalui Media 118
Tabel 4.17	Mendiskusikan isi Berita Politik 119
Tabel 4.18	Mengikuti Acara Debat Politik di Televisi 120
Tabel 4.19	Menganalisis dan mengkritisi berita politik 121
Tabel 4.20	Mengikuti Kampanye Partai Politik..... 122
Tabel 4.21	Memahami tentang Cara memilih sebagai Pemilih Dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah 123
Tabel 4.22	Memiliki Informasi tentang Perkembangan Politik di Indonesia 124
Tabel 4.23	Memahami Isu-Isu Penting yang Dihadapi oleh Negara 124
Tabel 4.24	Termotivasi Untuk Aktif dalam Kegiatan Sosial 126

Tabel 4.25	Terdorong Untuk Melakukan Berbagai Kegiatan Organisasi.....	127
Tabel 4.26	Mengetahui Partai Pemenang Pemilu Legislatif 2009	128
Tabel 4.27	Mengetahui Nama-nama Partai Peserta Pemilu Legislatif 2009.....	129
Tabel 4.28	Mengetahui Partai Pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres Tahun 2009.....	130
Tabel 4.29	Mengikuti Berita Perkembangan Perolehan Suara Pemilu Legislatif tahun 2009	131
Tabel 4.30	Mengikuti Berita Perkembangan Perolehan Suara Pemilu Presiden tahun 2009	131
Tabel 4.31	Mengetahui Fungsi MPR	132
Tabel 4.32	Mengetahui Fungsi DPR.....	133
Tabel 4.33	Mengetahui Fungsi DPD.....	134
Tabel 4.34	Memilih dan Mengangkat Menteri.....	135
Tabel 4.35	Memiliki Pilihan Partai Politik	136
Tabel 4.36	Alasan Menggunakan Hak Pilih	137
Tabel 4.37	Partai Pilihan Responden	138
Tabel 4.38	Kemampuan Dalam Menjaga Nilai Persamaan	139
Tabel 4.39	Kemampuan Dalam Menghargai Nilai Perbedaan.....	140
Tabel 4.40	Kemampuan Dalam Menerapkan Nilai Toleransi.....	141
Tabel 4.41	Kemampuan Dalam Menjaga Nilai Kebebasan	142
Tabel 4.42	Kemampuan Dalam Mengembangkan Nilai Solidaritas.....	143
Tabel 4.43	Bergaul dengan Teman Yang Memiliki Pandangan Politik/Kalangan yang berbeda	144
Tabel 4.44	Bekerjasama dengan Teman Yang Memiliki Pandangan Politik/ Kalangan yang berbeda	145
Tabel 4.45	Bekerjasama dengan Baik Bersama Teman Yang Berbeda Ras, Suku, Agama dan Budaya	146
Tabel 4.46	Pemenuhan Janji Para Politisi dalam Kampanye	147
Tabel 4.47	Para Politisi Sering Mengumbar Janji Agar Namanya Terpilih dalam Pemilu	148
Tabel 4.48	Pemerintah Menghambur-hamburkan Urang Rakyat Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Para Politisi	149
Tabel 4.49	Peran Para Politisi Memperjuangkan Aspirasi Rakyat	150
Tabel 4.50	Peran Para Politisi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	151

Tabel 4.51	Usaha Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi	152
Tabel 4.52	Kegiatan Organisasi di Sekolah dan di Luar Sekolah.....	153
Tabel 4.53	Mengikuti rapat-rapat Organisasi di Sekolah dan di Luar Sekolah	154
Tabel 4.54	Aktifitas Sosial di Lingkungan RT dan RW	155
Tabel 4.55	Menjadi Anggota Ekstrakurikuler di Sekolah	156
Tabel 4.56	Menjadi Anggota Organisasi Sosial di Luar Sekolah	157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik berubah menjadi desentralistik.. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga adanya tuntutan globalisasi di bidang pendidikan yang memacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju.(Kunandar, 2007:131).

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan (Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, 2004).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, Negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke 20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya (peristiwa Malari Tahun 1974 dan peristiwa Kerusuhan Mei 1998). Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Generasi muda pada masa Pemerintahan Orde Baru kurang mendapatkan ruang untuk menikmati alam demokrasi yang sesungguhnya dan tidak dapat menggunakan hak-hak politik sebagai warga Negara. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non pemerintahan

perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi dan diharapkan demi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu Negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga Negara yang demokratis. Warga Negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Sesungguhnya kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan Negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga Negara yang memiliki komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga Negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab sekolah tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata pelajaran yang mengfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan-pendidikan khusus yang tidak diperoleh dalam keluarga. Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak mengenai pentingnya hidup bernegara, rasa cinta

tanah air dan rasa setia kepada Negara, juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana anak diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah.

Hal yang kiranya belum terjadi pada pemilih pemula dari pelajar setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah adalah strategi pencerdasan pemilih pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sekolah menurut Budiyanto (2006 :16) merupakan salah satu agen sosialisasi politik.

Peneliti yang lain berpendapat bahwa kaum muda tidak hanya kurang tertarik pada politik, tapi juga mereka kurang tertarik pada berbagai bentuk keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan dan mereka lebih tidak mempercayai lembaga-lembaga politik dibandingkan kelompok umur lainnya. Putnam (2000:23) berpendapat bahwa penggantian generasional merupakan kunci dari mekanisme untuk menerangkan perubahan orientasi politik ini.

Pandangan yg bertolak belakang ditunjukkan oleh Inglehart (2003: 73) dari hasil survey Nilai Dunia yang menemukan bahwa kaum muda lebih mempercayai norma-norma demokrasi daripada generasi yang lebih tua. Mereka lebih toleran dan cenderung lebih kritis terhadap lembaga-lembaga yang hirarkis dan otoriter. Hal ini terutama yang berhubungan dengan persamaan gender dan toleransi terhadap berbagai variasi gaya hidup. Kaum muda lebih open-minded dan ini dapat diinterpretasikan sebagai meluasnya penerimaan ide-ide demokrasi (Inglehart and Norris, 2003:73).

Di Sekolah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di tingkat SLTA khususnya di SMA Negeri 2 Semarang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) sangat memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan politik sejak dini sebagai pemilih pemula dalam pemilu. Standar kompetensi yang diajarkan kepada siswa kelas X, Kelas XI dan XII melalui pendidikan kewarganegaraan meliputi, Hakekat Bangsa dan Negara, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, Hak Asasi Manusia, Dasar Negara dan Konstitusi, Kedudukan Warga Negara, Sistem Politik, Budaya Politik, Demokrasi Menuju Masyarakat Madani, Keterbukaan dan Keadilan, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Sistem Pemerintahan, Pers dan Globalisasi sangat sesuai dengan pendidikan politik awal sebagai siswa selaku warga Negara.

Dengan pendidikan politik yang benar dan rasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa akan dapat membiasakan membahas tema-tema tentang politik, baik politik nasional maupun politik lokal seperti Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Walikota Semarang. Guru memfasilitasi kegiatan siswa untuk diskusi, bermain peran, mendemonstrasikan pelaksanaan pemilu, debat politik dan sebagainya agar pembelajaran menjadi menarik, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

SMA Negeri 2 Semarang sebagai salah satu agen sosialisasi politik memiliki andil yang besar dalam pendidikan politik pemilih pemula yang diharapkan dapat mendidik

siswa menjadi warga Negara yang baik, dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas dan rasional. Semenjak kelas X sampai kelas XII mereka sudah mendapatkan pembelajaran politik bagi pemula melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran politik yang cerdas, rasional dan santun akan membawa perilaku siswa dalam memahami politik dan menggunakan kecerdasannya untuk menggunakan hak politiknya pada Pemilihan Umum, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pilkada.

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai pengalaman pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu legislatif, pilpres, pilgub dan pilwakot) sebagai salah satu sumber pendidikan politik akan memberikan warna dan akan membentuk perilaku politik siswa sesuai dengan pembelajaran politik yang telah terinternalisasi sejak awal mengenal isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Strategi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat bervariasi, inovatif, kreatif, demokratis dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran politik awal siswa dapat memahami politik dengan benar, artinya dapat memahami, menghayati dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain Ilmu Politik, Ilmu Negara, Hukum, Moral dan Filsafat. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik artinya dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembelajaran politik interaktif di kelas sangat beragam seperti; diskusi, debat maupun mendemotrasikan kelompok kepentingan, kelompok penekan, kampanye dan

mendemontasikan pemilihan kepala daerah. Dengan bimbingan guru sebagai salah satu sumber belajar serta mengambil sumber dari media (televisi dan media cetak) dan politik yang berkembang di masyarakat dan kenyataan yang dilihat di masyarakat, siswa dapat mempresentasikan kebolehannya sebagai pelaku politik, pemilih pemula maupun sebagai partisipan sesuai dengan kajian materi masing-masing dalam pembelajaran di kelas.

Guru sebagai desiminator nilai, norma, dan perilaku politik dituntut mempunyai profesionalisme yang mapan. Aktualisasi profesionalisme itu antara lain dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di sekolah. Jika guru berorientasi pada kekuasaan negara, maka akan berperan sebagai agen, sebab guru akan bertindak sebagai mediator atau pelaksana sosialisasi politik berdasarkan ideologi penguasa.

Guru sebagai sarana pencapaian target kurikulum yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan sebelumnya dengan berstandar pada kompetensi, kompetensi dasar dan indikator sebagai alat ukur pencapaian. Pada umumnya guru bersikap sebagai intelektual organis, bagian birokrasi dan *state society*, maka guru berperan sebagai media untuk kepentingan *regime*. Akan tetapi jika guru berperan sebagai agen maka dia akan bertindak sebagai pengembang kurikulum, berdasarkan ruang dan waktu yang tersedia akan memodifikasi kurikulum. Biasanya guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada *civil society*, kreatif dalam mengembangkan hidden curriculum, sehingga pendidikan politik bertujuan untuk national building.

Padahal untuk memperkokoh tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih atas kaum remaja untuk pendidikan politik menjadi kian penting. Demokrasi akan digoyang terus

oleh kepentingan kekuasaan, dinasti politik, familisme, ideologisme dan segala macam kepentingan kaum tua lainnya. Demokrasi hanya diisi dengan segala macam potret palsu tentang perhatian kepada rakyat, ketika kaum remaja sebagai generasi pengganti tidak diikutsertakan dalam mencerna dunia dan masalah-masalahnya. Untuk itu pendidikan politik yang pada saatnya mempengaruhi perilaku politik para siswa sebagai pemula yang berdasarkan kepentingan kaum remaja sendiri sangat dibutuhkan dan diperlukan, terutama untuk mencegah agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai “ pendidikan politik pemilih pemula “ yang tidak tahu apa-apa.

Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994). Sedangkan menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba bahwa budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam budayanya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.

Pendidikan politik bagi remaja sangat penting sebagai upaya untuk pengembangan budaya politik. Pendidikan politik remaja perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga remaja diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Jika pemuda memang betul memegang kunci masa depan dari sistem politik kita, sangatlah penting untuk memahami bagaimana mereka mendapatkan sosialisasi politik. Sapiro (2004:4) berpendapat bahwa, penelitian sosialisasi politik saat ini berbeda secara fundamental dari penelitian-penelitian serupa yang menjamur 1950an dan 1960an. Penelitian yang dilakukan di masa lalu menekankan fungsi sosialisasi politik sebagai

mekanisme untuk menjamin stabilitas politik. Nampak sekali studi sosialisasi pada waktu itu sangat dipengaruhi paradigma Parsonian.

Dalam pandangan Parson, sistem sosial menjaga stabilitas dan mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan proses sosialisasi yg intensif ketika nilai-nilai yg menopang sistem dipegang oleh kaum tua. Dalam pandangan Parson sosialisasi menjamin stabilitas, tidak membawa modernisasi atau perubahan sosial, dan penelitian sosialisasi tahun 1950an dan 1960an memberikan tekanan kepada hal tersebut.

Pertanyaan penelitian yang tipikal adalah apakah pemuda tahu lagu kebangsaan mereka, dan nama presiden serta pandangan mereka terhadap penghianat bangsa. Penelitian sosialisasi politik saat ini, berlawanan dengan itu, memfokuskan pertanyaan tentang dimana dan bagaimana kaum muda mendapatkan pengetahuan politik, apakah mereka tertarik politik, atau apakah mereka terlibat atau bermaksud untuk melibatkan diri dalam kehidupan sosial dan politik (Torney-Purta, 2004:4).

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pendidikan politik bertujuan untuk mewujudkan atau menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa

Orang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka didalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan “ nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “ aturan permainan politik “ (rule of the political game) yang tidak tertulis, seperti sekolah-sekolah negeri di Inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal dan integritas politik (Mohtar Mas’oed, 1995 : 38).

Pentingnya sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi politik, karena sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan dapat memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, dan ikrar kesetiaan “ padamu negeri “. Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik.

Sosialisasi politik melalui sekolah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agen sosialisasi politik lainnya. Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa dapat menerima sosialisasi politik secara langsung, karena kompetensi dasar mata pelajaran tersebut memuat kompetensi dasar mayoritas pembelajaran politik.

Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi politik peserta didik, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam perilaku politiknya setelah masuk

sekolah dan melakukan komunikasi, interaksi terhadap lingkungan warga sekolah yang memungkinkan menambah pengalaman siswa dalam menghadapi masalah pribadinya dan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa jalur pendidikan sekolah/formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang (pasal 1 ayat 10). Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Sementara dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan sekolah dengan melalui kurikulum antara lain yaitu; a). anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru (karyawan), b) anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah dan c) mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Sekolah mempunyai peranan yang penting dan fundamental di dalam proses sosialisasi politik pada peserta didik, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial yaitu makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik didalam masyarakat, menjadi warga negara yang baik serta mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebab bagaimanapun pada akhirnya para peserta didik akan hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pemahaman tersebut di atas di atas, maka proses sosialisasi politik pada SMA Negeri 2 Semarang sangat menarik untuk diteliti, maka penulis menyusun thesis dengan judul “ Peranan Sekolah dalam Proses Sosialisasi Politik terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang“.

Alasan penulis memilih SMA Negeri 2 Semarang, karena menurut pengamatan penulis Sekolah tersebut memiliki karakteristik yang sangat khas dibandingkan dengan SMA yang lain di Kota Semarang. Pembelajaran politik melalui Standar Kompetensi Budaya Politik Indonesia dan Budaya Demokrasi memberikan pengalaman dan wawasan yang sangat luas dan sangat berharga terhadap siswa tentang kesadaran politik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku politik siswa tentang pemahaman politik.

Pada pembelajaran ini siswa dapat mendemonstrasikan budaya politik partisipan dengan berlatih dan merancang pendirian partai politik lengkap dengan gambar, visi dan misi, asas, proram kerja partai dan dapat demonstrasikan di depan kelas secara berkelompok serta dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika siswa harus mendemonstrasikan pemilu lokal (pilkada) baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah maupun Pemilihan Walikota Semarang, dari simulasi kampanye sampai dengan simulasi pemungutan suara.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang didapat dari uraian tersebut di atas adalah “ Bagaimana Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang “ .

Beberapa pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peranan sosialisasi politik yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang ?
- b. Bagaimana hasil sosialiasi politik pada siswa SMA Negeri 2 Semarang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan sekolah dalam proses sosialisasi politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Untuk mengetahui hasil Sosialisasi Politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Untuk mengetahui bentuk Partisipasi Politik siswa dalam Sosialisasi Politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Politik, bagi Pendidikan Kewarganegaraan terutama Sosialisasi Politik di sekolah yang merupakan salah satu sarana agen perubahan dan sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan sosialisasi politik dan partisipasi politik.

1.3.2.1. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan di masa yang akan datang. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik khususnya bagi para siswa SLTA sehingga perilaku

politik dari para siswa didasarkan pada pendidikan politik yang cerdas, rasional dan tidak menyesatkan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Sosialisasi Politik

2.1.1 Konsep sosialisasi politik

Sosialisasi Politik merupakan proses yang sulit dipahami. Secara luas dikatakan sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu (Almond and Verba, 1963). Sosialisasi politik merupakan produk dari fenomena mikro dan makro yang saling bertautan. Pertanyaan mendasar pada level makro dalam penelitian sosialisasi politik adalah bagaimana masyarakat politik mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan pendapat-pendapat serta perilaku kepada masyarakat? Studi sosialisasi politik pada level mikro mempertanyakan:

bagaimana dan mengapa orang-orang menjadi warga negara? Pada level makro sistem politik, sosialisasi politik merupakan alat yang digunakan masyarakat politik untuk menanamkan norma-norma dan praktek-praktek yang tepat kepada warganya (Sapiro, 2004: 2).

Masyarakat politik membawakan pola-pola yang telah terpolakan dari pemikiran, tindakan, hukum dan norma serta tradisi melalui agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, sistem pendidikan, kelompok bermain, organisasi masyarakat, media, lembaga politik, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan serta militer (Beck, 1977).

Pertanyaan-pertanyaan sejenis ini yang ditujukan pada level makro memberikan perhatian kepada “dimana dan bagaimana orang membangun orientasi dan praktek politiknya yang mengubah desain lembaga demokrasi dan konstitusi ke dalam pembuatan masyarakat demokratis yang nyata dan berfungsi” (Sapiro, 2004: 19). Pada level mikro, sosialisasi politik merupakan pola-pola dan proses yang dilalui individu dalam melibatkan diri dalam pembangunan dan pembelajaran politik, membentuk konteks yang khusus dengan lingkungan politik tempat tinggalnya (Sapiro, 2004: 3).

Sosialisasi politik pada dasarnya merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Beberapa ahli ilmu sosial menggunakan istilah sosialisasi untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa.

Sosialisasi politik menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.

Jadi sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Disamping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya, proses ini disebut tranmisi kebudayaan (Mas;ud, 1995:34).

Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik, yaitu Pertama; Sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat, sementara ia menjalani berbagai pengalaman sosial. Pengaruh keluarga selama masa kanak-kanak, misalnya akan menciptakan gambaran yang baik mengenai suatu partai politik tertentu dalam pemikiran seseorang. Tetapi pendidikan sekolah, pengalaman bekerja dan pengaruh pergaulan mungkin saja merubah gambaran itu dengan dramatis.

Kedua; Sosialisasi politik dapat berujud tranmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi yang bersifat langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atau SMA adalah sebuah contoh model sosialisasi politik secara langsung, seperti halnya usaha-usaha partai komunis untuk menciptakan “orang Soviet” atau “ orang sosialis Kuba”. Sosialisasi politik tidak langsung terutama

sangat kuat berlangsung di masa kanak-kanak sejalan dengan berkembangnya sikap penurut atau sikap pembangkang terhadap orang tua, guru, teman-teman dan lain-lain.

Sosialisai politik membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan kebudayaan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisai politik juga dapat merubah kebudayaan politik, yaitu bila sosialisasi itu menyebabkan penduduk, atau sebagian penduduk, melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain (Mas;ud, 1995:34).

2.1.2 Pentingnya Sosialisasi Politik

Dengan melihat konsep sosialisai politik tersebut di atas dan secara efektif mengetengahkan beberapa segi pentingnya sosialisasi politik.

Pertama, sosialisasi politik secara fundamental merupakan hasil proses belajar, belajar dari pengalaman, atau seperti yang dinyatakan oleh Aberle sebagai “pola-pola aksi “.

Kedua, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi, berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif atau nilai-nilai dan sikap-sikap.

Ketiga, sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai pada usia kanak-kanak dan masa remaja saja (sekalipun pada usia tersebut merupakan periode-periode yang paling penting dan berarti), akan tetapi sosialisasi itu tetap berlanjut sepanjang kehidupan.

2.1.3 Mekanisme Sosialisasi Politik

Para agen mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi politik sangat bervariasi, dan model tersebut dahulu mensugestikan tiga mekanisme, yaitu 1) imitasi (peniruan), 2) instruksi dan 3) motivasi. Robert Le Vine mensugestikan, bahwa ketiga hal tersebut adalah mekanisme dari sosialisasi politik pada masa kanak-kanak, akan tetapi tidak terdapat alasan untuk tidak menerapkan pada seluruh proses sosialisasi.

- a. Imitasi, merupakan peniruan (*copy*) terhadap tingkah laku individu-individu lain, dan merupakan hal yang sangat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak, walaupun sebenarnya tidak dibatasi pada tingkah laku kanak-kanak saja. Namun demikian imitasi murni lebih banyak terdapat di kalangan anak-anak, pada masa remaja dan pada orang dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula baik instruksi maupun motivasi.
- b. Instruksi, merupakan peristiwa penjelasan diri, sungguhpun harus ditekankan bahwa hal itu tidak perlu hanya terbatas hanya pada proses belajar formal saja. Seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam satu situasi yang instruksi sifatnya. Hal ini adalah jelas seperti kasus, misalnya bermacam-macam tipe pendidikan kejuruan sambil bekerja (*type training vocational "on the job"*), dan beberapa diantaranya agaknya relevan dengan tingkah laku politik, sedangkan praktek dari beberapa organisasi atau kelompok-kelompok perorangan yang menjelma jadi kelompok-kelompok diskusi merupakan tipe instruksi yang informal dan eksplisit sifatnya.

- c. Motivasi, seperti yang disebutkan oleh Robert Le Vine adalah bentuk “tingkah laku yang tepat cocok” yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (trial dan error) : individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama-cocok dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapat sendiri.

2.1.4 Sosialisasi Politik Orang Dewasa

Apabila tekanan yang telah diberikan kepada eksperimental dan pengaruh lingkungan itu ternyata benar, maka masuk akal untuk beranggapan bahwa pengaruh tersebut akan terus berkelanjutan menjadi penting selama usia dewasa, dan bahwa proses sosialisasi itu berlanjut terus menerus melampui masa kanak-kanak dan masa remaja, bagian pokok dari tingkah laku politik di masa depan dapat ditentukan di masa-masa yang lebih muda, akan tetapi adalah lebih mungkin menciptakan suatu situasi dimana terdapat interaksi diantara sosialisasi politik dini dengan pengaruh-pengaruh eksperimental dan lingkungan dari masa kehidupan selanjutnya, daripada menghindarkan sosialisasi orang dewasa.

Sikap mereka terhadap situasi-situasi khusus ternyata sangat identik dengan bermacam-macam kelompok dimana mereka menjadi anggota di dalamnya, dan kelompok-kelompok referensi ini berperan sebagai pembimbing sebagai batu-batu ujian didalam reaksi individu terhadap pengalaman-pengalamannya, dan memberikan bukti selanjutnya dari suatu proses yang berkesinambungan dari sosialisasi sepanjang kehidupan orang dewasa.

2.1.5 Sosialisasi Politik dan Kesadaran Politik Remaja.

Dalam artian umum sosialisasi politik adalah cara bagaimana suatu bangsa menstransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing- masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dan bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai *anggota civil society*. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri.. Proses tersebut bukan

hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara untuk ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan - hambatan demokrasi (Riza Noer Arfani, 1996 :64).

Namun demikian disamping dibicarakan masalah kesadaran politik, maka perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan pengertian budaya politik, menurut Mirian Budiharjo konsep budaya politik ini berdasarkan keyakinan, bahwa setiap politik itu didukung oleh suatu kumpulan kaedah, perasaan dan orientasi terhadap tingkah laku politik.

2.1.6 Jenis Sosialisasi Politik

Dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua ; pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Ramlan Surbakti, 1992:117).

a. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik.

Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan partai politik, dalam sistem politik demikian dapat melaksanakan proses pendidikan politik.

b. Indoktrinasi politik

Yang dimaksud indoktrinasi ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Melalui berbagai forum penguasa yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.

2.1.7 Proses Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi politik merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok sebaya, kelompok

agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik (Rafael Raga Maram, 2007:136).

Sosialisasi politik dapat berujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tak langsung. Sosialisasi langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai dan perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit. Mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah lanjutan adalah sebuah contoh dari sosialisasi politik langsung (Mohtar mas' oed, 1995:34).

Sedangkan sosialisasi politik tak langsung terutama sangat kuat berlangsung dimasa kanak-kanak dengan berkembangnya sikap penurut atau sikap pembangkang terhadap orang tua, guru dan teman, yaitu sikap-sikap yang cenderung mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara (Mohtar mas,oed, 1995:35).

Menurut Ijwara (1995) tipe sosialisasi politik yang dimaksud adalah bagaimana cara atau mekanisme sosialisasi politik berlangsung. Oleh karena itu, tipe sosialisasi politik dapat disebut pula dengan mekanisme sosialisasi politik. Ada dua tipe sosialisasi politik yaitu langsung dan tidak langsung (Ijwara, 1995 : 15)

a. Sosialisasi politik langsung

Sosialisasi politik langsung berlangsung dalam satu tahap saja, yaitu bahwa hal-hal yang diorientasikan dan ditranmisikan adalah hal-hal yang bersifat politik saja. Sosialisasi politik langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1) Peniruan Perilaku (imitasi)

Proses menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain. Yang ditiru bukan hanya pandangan politik, tetapi juga sikap-sikap politik, keyakinan politik, harapan mengenal politik, tingkah laku politik, serta ketrampilan dalam berpolitik.

2) Sosialisasi Antisipatori

Sosialisasi politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh politik yang diidealkan.

3) Pendidikan Politik

Sosialisasi politik melalui pendidikan politik adalah upaya yang secara sadar dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan, dan memberikan pelajaran kepada anak untuk memiliki orientasi politik tertentu. Pendidikan politik bisa dilakukan di Sekolah, organisasi, partai politik, media massa, diskusi politik, serta forum-forum politik.

4) Pengalaman Politik

Pengalaman politik adalah belajar langsung dalam kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Terlibat langsung dalam kegiatan partai politik.

b. Sosialisasi politik tidak langsung

Sosialisasi politik tidak langsung adalah warga negara pada mulanya berorientasi pada hal-hal yang bukan politik (non politik), namun kemudian mempengaruhinya untuk memiliki orientasi politik. Terdapat dua tahap dalam sosialisasi politik tidak langsung yaitu tahap pertama berorientasi pada

non politik, tahap kedua digunakan untuk orientasi pada politik. Sosialisasi politik secara tidak langsung ini dapat dilakukan melalui tiga cara

1) Pengalihan hubungan antar individu (Interpersonal)

Hubungan antar individu yang pada mulanya tidak berkaitan dengan politik, namun nantinya akan berpengaruh ketika berhubungan atau berorientasi dengan kehidupan politik. Contohnya, hubungan mahasiswa dengan dosen, nantinya akan membentuk siswa manakala ia bertemu dengan walikota/bupati.

2) Magang

Magang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar. Magang di tempat-tempat tertentu atau orientasi non-politik, nantinya akan mempengaruhi seseorang ketika berhubungan dengan politik. Contohnya, mahasiswa ikut organisasi kemahasiswaan, dalam organisasi tersebut mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, dan membuat keputusan. Kegiatan ini akan sangat membantu manakala mahasiswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik praktis.

2) Generalisasi

Kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini selama ini yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan politik dapat mempengaruhi seseorang untuk berorientasi pada obyek politik tertentu. Contohnya, seseorang yang memiliki kepercayaan bahwa semua orang pada dasarnya baik, maka kepercayaan ini akan menjadikan ia berprasangka baik terhadap semua pejabat negara. Sebaliknya, jika seseorang berpendapat bahwa semua orang pada

dasarnya buruk, ia akan hati-hati manakala bertemu dengan pejabat. Jadi kepercayaan atau nilai-nilai yang diyakini digeneralisasikan kepada kehidupan politik.

2.1.8 Agen Sosialisasi Politik.

Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Beberapa diantaranya, seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan lain. Lainnya, seperti kelompok bergaul dan bekerja, hanya cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi politik secara tidak langsung. Sarana sosialisasi politik dapat melalui :

- a. Keluarga. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (authority). Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan-keputusan yang di buat itu bisa otoritatif dalam arti, keengganan untuk mematuhiya dapat mengundang hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas, dengan membentuk ikatan-ikatan etnis,

linguistik, religius dan kelas sosialnya, dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya dan dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonominya.

- b. Sekolah. Orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peranan penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik” (rule of plitical game) yang tidak tertulis.
- c. Kelompok Pergaulan. Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelas terlibat dalam sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk kelompok bermain di masa kanak-kanak, kelompok persahabatan dan kelompok kerja yang kecil, dimana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggotanya

dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompoknya.

- d. Pekerjaan. Pekerjaan dan organisasi, organisasi formal maupun non formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh, klub sosial dan yang semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok tertentu, seperti serikat buruh, dengan menggunakan kelompok itu sebagai acuan dalam kehidupan politik. Mereka menjadi sensitif terhadap norma-norma kelompok itu dan menilai tindakan-tindakannya berdasar perhitungan apa yang paling baik bagi kelompok itu.
- e. Media Massa. Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi dan informasi yang luas, cepat dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja di belahan dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia, terutama bagian-bagiannya yang modern telah menjadi satu kelompok penonton tunggal yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, internet, majalah memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka.
- f. Kontak-kontak politik langsung.
Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah, tetapi seseorang telah diabaikan oleh partainya, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib belajar militer,

pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis politik dan konflik, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

Sekolah sebagai agen perubahan sosialisasi politik, memegang peranan penting. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spriritual dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan.

Faktor Kontekstual seperti perbedaan metode belajar, akses terhadap institusi seperti parpol, kelompok sosial, dan komunitas online, dan tingkat intensitas eksposisi dari kaum muda terhadap pembicaraan dan aktivitas orang dewasa mempengaruhi sosialisasi (Sapiro :2004). Penelitian yang dilakukan mendapatkan bahwa siswa yang tinggal dalam wilayah yang berbeda memiliki pengalaman dan orientasi politik berdasarkan komunitas lokal mereka bahkan ketika variabel demografi dan SES diperhitungkan. Siswa yang terisolasi dalam lingkungan pendidikan yang terpisah kurang berhubungan dengan budaya utama sangat mungkin untuk tidak mengembangkan norma-norma partisipasi politik (Ellen et al., 2002).

Individu dapat mengembangkan pandangan-pandangan mereka berdasarkan nilai-nilai bersama masyarakat ketika keanggotaan tidak berdasarkan identitas etnik tapi kebutuhan dan kelemahan bersama (Williams, 2003).

Isu-isu seputar lingkungan, global warming, pangan dan pertanian, intervensi militer, kemiskinan, rasisme, telah membawa orang untuk menganggap masa depan mereka bertautan dengan orang-orang di luar negeri atau budaya mereka. Berkaitan dengan hal ini Sapiro melihat perlunya peneliti untuk mencermati lembaga supranational dalam sosialisasi warga dunia (2004). Bersamaan dengan itu cara melakukan studi terhadap agen sosialisasi politik juga harus diperhatikan. Sejauh mana siswa dipisahkan dari aktivitas orang dewasa yang berhubungan dengan politik mempengaruhi keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan dewasa mereka nantinya.

Dengan demikian disamping simulasi kehidupan politik, pengalaman pembelajaran dalam kehidupan yang nyata dalam aktivitas sosial dan politik penting untuk membentuk pengalaman politik yang bermakna

Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 1960an Langton dan Jennings menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak memiliki efek pada sosialisasi politik. Selengkapnya dikatakan: "Our findings certainly do not support the thinking of those who look at the civics curriculum in American High Schools as even a minor source of political socialization (1968:863).

Pandangan ini mendapatkan gugatan dari banyak ahli yang melakukan penelitian di bidang sosialisasi politik akhir-akhir ini. Peran sekolah dalam proses pembelajaran politik sangat penting, terutama dalam peningkatan pengetahuan politik siswa (Goulet,2008). Pengalaman pembelajaran di sekolah memiliki dampak terhadap perilaku mereka setelah dewasa. Norma-norma kewarganegaraan yang telah mereka dapatkan ketika

sekolah memiliki efek yang panjang, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik.

2.2 Kebudayaan Remaja sebagai Pemilih Pemula

Siswa atau remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai “ dunia sendiri “. Dalam sistem remaja ini terdapat kebudayaan yang antara lain mempunyai nilai-nilai, norma-norma. Sikap serta bahasa tersendiri yang berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian remaja pada umumnya mempunyai persamaan dalam pola tingkah laku, sikap dan nilai, dimana pola tingkah laku kolektif ini dapat berbeda dalam beberapa hal dengan orang dewasa (Priyono, 1987).

Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya atau “ peer group “ adalah penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman tersendiri dalam pergaulan.

Masa pubertas merupakan tahap permulaan perkembangan perasaan sosial. Pada masa ini timbul keinginan remaja untuk mempunyai teman akrab dan sikap bersatu dengan teman-temannya. Sedangkan terhadap orang dewasa mereka menjauhkan diri. “ Peer culture” ini berpengaruh sekali selama masa remaja sehingga nilai-nilai kelompok sebaya mempengaruhi kelakuan mereka. Seorang remaja membutuhkan dukungan dan konsensus dari kelompok sebayanya, dalam hal ini setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok akan mendapat celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara remaja dan kelompoknya bersifat solider dan setia kawan. Pada umumnya para remaja atas

kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dalam minat, kesenangan atau faktor lain.

Berkenaan dengan kapasitas kebudayaan siswa/remaja tersebut, setidaknya dapat dijadikan gambaran penting upaya melihat peta demokrasi dan kesadaran politik kalangan remaja di lingkungan persekolahan sebagai bagian pemilih pemula dalam pemilihan umum. Menurut Bambang, ada tiga tingkat materi yang perlu ditanamkan dalam kurikulum pendidikan berkaitan dengan sosialisasi politik melalui kurikulum pendidikan. Ketiga materi tersebut adalah Penanaman hakikat pemilu yang benar sehingga memunculkan motif yang kuat bagi pemilih pemula untuk mengikuti pemilu, pemahaman mengenai pemilu dan pemahaman tentang posisi tawar politik.

Pemahaman perilaku politik (*political behavior*) yaitu perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Sedangkan menurut Almond dan Verba yang dimaksud dengan budaya politik (*political culture*) merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragamnya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Warga negara senantiasa mengidentifikasi dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki (Budiyanto 2004 : 103).

2.3 Perilaku politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (

kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Abdul Munir Mulkan melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Jack. C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan, perilaku politik adalah :

“ Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan - tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerakan protes, lobyng, kaukus, kampanye dan demonstrasi)”

Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yaitu suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari manusia. Menurut T. Parson dalam Soekamto, salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni :

- a. diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
- b. terjadi pada situasi tertentu
- c. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu dan
- d. terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu

Sementara Jalaluddin Rakhmat (2001:118), mendefinisikan tindakan sebagai hasil komulatif seluruh proses pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis dan efek dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian menurut Rogers dan Shoemakers, perilaku pada dasarnya terarah pada tujuan yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhannya sebagaimana dihayati dalam dunianya, yaitu dunia menurut penghayatannya. Dengan demikian, pengertian tindakan berkaitan dengan perilaku, dimana antara keduanya saling terikat dan faktor yang mempengaruhi perilaku adalah sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan.

Sementara Sudijono Sastroatmodjo (2001:52) menambahkan bahwa perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan popularitas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tersebut. Perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek yang dapat berupa pemerintah juga masyarakat.

Selain itu, terdapat kaitan yang erat antara perilaku politik dan budaya politik, yaitu bahwa perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh suatu temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang bisa disebut peradaban politik. Artinya perilaku politik dapat tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau tentang ideologi negara yang sedang dianut di masyarakat tersebut serta interaksi yang muncul antara masyarakat, individu dan budaya politik tersebut.

Menurut Gabriel A. Almond, proses politik akan melahirkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang kemudian akan disosialisasikan melalui tranmisi kebudayaan, baik melalui pendidikan keluarga, di lingkungan pekerjaan, interaksi melalui model media komunikasi massa, maupun interaksi politik secara langsung. Sehingga Almond kemudian memilahkan milahkan kategori budaya politik tersebut atas tiga pemilahan, yaitu budaya politik partisipan, budaya politik kaula/subyek dan budaya politik parokial.

2.4 Definisi Konsep dan Operasional

2.4.1 Definisi Konsep

Konsep dapat diartikan sebagai suatu abstraksi suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, keadaan kelompok atau individu tertentu, penggunaan definisi konsep diharapkan dapat

menyederhanakan pemahaman menggunakan dua istilah tertentu beberapa kejadian yang saling berkaitan (Ahmd Nursal, 2004:22).

Definisi konsep dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi politik (*political socialization*) adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.
- b. Pembelajaran politik (*political learning*) adalah upaya yang secara sadar dan sengaja sebagai proses dialog antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik.
- c. Pengetahuan politik (*political knowledge*) adalah pengetahuan tentang sistem politik dan bagaimana bekerjanya serta menginternalisasikan nilai-nilai politik, ideologi, simbol-simbol politik, menjadi tahu tentang peran aktif dan pasif anggota masyarakat politik dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan.
- d. Keperpihakan politik (*political partisanship*) adalah sikap politik yang ditunjukkan dengan empati terhadap salah satu partai politik berdasarkan orientasi politiknya.
- e. Nilai-nilai kebebasan dan hak sipil (*civil liberties and civil rights*) adalah memahami atau membaca tatanan sosial dan politik dengan cara menghargai kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, menghargai keyakinan dan pemikiran orang lain.

- f. Kepercayaan politik (*political trust*) adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik atau lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan konstitusi.
- g. Keterlibatan politik (*political involvement*) adalah keterlibatan secara langsung dalam proses politik atau aktifitas politik seperti; mengikuti kampanye partai politik, menjadi pengurus partai politik, diskusi politik dsb.

2.4.1 Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi politik.

Sekolah :

- 1) Proses sosialisasi politik secara langsung
- 2) Proses sosialisasi politik secara tidak langsung
- 3) Aktifitas organisasi siswa di sekolah.

- b. Pembelajaran politik.

- 1) Tingkat pemahaman tentang politik nasional
- 2) Tingkat keterlibatan dalam aktivitas politik sekolah
- 3) Tingkat pemahaman tentang isu-isu penting yang dihadapi negara Indonesia.

- c. Pengetahuan politik.

Partai Politik dan Pemilu

- 1) Tingkat pengetahuan tentang Partai Pemenang Pemilu 2009

- 2) Tingkat pengetahuan tentang nama Partai Peserta Pemilu 2009.
- 3) Tingkat pengetahuan tentang Partai pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2009.
- 4) Tingkat pengetahuan tentang partisipasi politik dalam pemilu.
- 5) Tingkat pengetahuan tentang seleksi calon Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu

d. Lembaga-lembaga politik.

- 1) Tingkat pengetahuan tentang fungsi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- 2) Tingkat pengetahuan tentang fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- 3) Tingkat pengetahuan tentang fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- 4) Tingkat pengetahuan tentang lembaga Kepresidenan.

e. Keperpihakan politik.

- 1) Pilihan terhadap partai politik.
- 2) Alasan memilih partai politik.
- 3) Keperpihakan terhadap partai politik
- 4) Tingkat keperpihakan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2009.
- 5) Intensitas dalam mengikuti kampanye Pemilu.

f. Nilai-nilai kebebasan dan hak sipil:

- 1) Tingkat kesadaran dalam menerapkan nilai persamaan.
- 2) Tingkat kesadaran dalam menerapkan nilai toleransi
- 3) Tingkat kemampuan dalam menjaga nilai kebebasan.
- 4) Tingkat kesadaran dalam memiliki nilai solidaritas

g. Kepercayaan Politik :

- 1) Harapan adanya pemenuhan janji kampanye para politisi
- 2) Harapan adanya jaminan apa yang dijanjikan oleh para politisi
- 3) Harapan tidak adanya pemborosan terhadap uang rakyat untuk keperluan pribadi para politisi
- 4) Harapan adanya aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh para politisi
- 5) Harapan adanya usaha Politisi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Harapan adanya usaha Pemerintah dalam pencegahan korupsi dan pemberdayaan sumber daya yang ada.

h. Keterlibatan politik :

- 1) Tingkat keterlibatan siswa dalam organisasi di sekolah maupun di luar sekolah.
- 2) Tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti rapat organisasi di sekolah maupun di luar sekolah
- 3) Tingkat keterlibatan siswa dalam aktifitas sosial di lingkungan RT dan RW.
- 4) Tingkat kesadaran siswa menjadi anggota organisasi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Format desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. penelitian deskriptif kuantitatif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap sesuatu perlakuan. Penelitian deskriptif kuantitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “ apa adanya “ tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Suharsini Arikunto, 2009 : 234)

3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah Peranan Sekolah dalam proses sosialisasi politik terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih adalah di SMA Negeri 2 Semarang, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan pertimbangan (1) Lokasi penelitian ini sangat mudah dijangkau karena peneliti juga sebagai guru SMA Negeri 2 Semarang (2) Menghemat tenaga, biaya dan waktu penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi obyek dalam penelitian ini adalah 414 siswa yang tersebar dalam 11 rombongan belajar sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar siswa Klas XI SMA Negeri 2 Semarang
Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Kelas	Jumlah siswa/jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	XI.IA1	8	20	28
2	XI.IA2	9	16	25
3	XI.IA3	10	18	28
4	XI.IA4	13	29	42
5	XI.IA5	14	28	42

6	XI.IA6	15	26	41
7	XI.IA7	14	26	40
8	XI.IA8	14	28	42
9	XI.IA9	14	27	41
10	XI.IS1	17	27	44
11	XI.IS2	21	20	20
	JUMLAH	149	265	414

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 2 Semarang

3.1.1 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

3.4 Teknik Penentuan Responden Penelitian (sampel)

Dalam penelitian ini cara memperoleh informasi, peneliti menggunakan teknik sampling berimbang (*proportional sampling*). Sampling berimbang selalu dikombinasikan dengan teknik lain yang berhubungan dengan populasi yang tidak homogen. Kata “ berimbang “ menunjuk pada ukuran jumlah yang tidak sama, disesuaikan dengan jumlah anggota tiap-tiap kelompok yang lebih besar. Dengan pengertian tersebut, maka dalam menentukan anggota sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subyek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut (Suharsini Arikunto, 2009 : 98).

Menurut Sugiyono (2002:87), berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 5 %, maka dari populasi 414 siswa diperoleh sampel sebanyak 165 siswa dengan perhitungan tersebut.

Peneliti ingin meneliti subyek siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 2 Semarang yang terdiri dari 11 rombongan belajar/kelas, program studi IA= 9 klas dan program studi IS = 2 klas. Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan sampling kelompok berimbang acak melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah siswa 11 kelas sebanyak = 414 siswa
2. Menentukan sampel berdasarkan tabel kesalahan 5 % sebanyak 165 siswa
3. Pengambilan sampel berdasarkan jumlah siswa dalam tiap-tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Rekapitulasi Polulasi Primary Sampling Unit (PSU)
 Klas XI Siswa SMA Negeri 2 Semarang
 Tahun Pelajaran 2009/2010

NO	KELAS	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
1	XI.IA1	28	11	$\frac{28}{414} \times 160 = 10,82$ atau menjadi 11
2	XI.IA2	25	10	$\frac{25}{414} \times 160 = 9,66$ atau menjadi 10
3	XI.IA3	28	11	$\frac{28}{414} \times 160 = 10,82$ atau menjadi 11
4	XI.IA4	42	16	$\frac{42}{414} \times 160 = 16,23$ atau menjadi 16
5	XI.IA5	42	16	$\frac{42}{414} \times 160 = 16,23$ atau menjadi 16
6	XI.IA6	41	16	$\frac{41}{414} \times 160 = 15,85$ atau menjadi 16
7	XI.IA7	40	15	$\frac{40}{414} \times 160 = 15,46$ atau menjadi 15
8	XI.IA8	42	16	$\frac{42}{414} \times 160 = 16,23$ atau menjadi 16
9	XI.IA9	41	16	$\frac{41}{414} \times 160 = 15,85$ atau menjadi 16
10	XI.IS1	44	17	$\frac{44}{414} \times 160 = 17,00$
11	XI.IS2	20	16	$\frac{41}{414} \times 160 = 15,85$ atau menjadi 16
	JUMLAH	414	165	

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam metode pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Pengamatan

Untuk mendapatkan informasi, maka pengamatan juga penting, guna mengetahui gerak-gerik yang dilakukan tetapi berpola selama masa penelitian dilakukan.

b. Kuesioner

Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, Kelas XI. Dalam hal ini peneliti mengirimkan kuesioner secara langsung maupun tidak langsung. pertanyaan dalam kuesioner bersifat terbuka dan tertutup yang akan digunakan untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dan konstruksi yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam guna melengkapi informasi kuesioner

d. Studi Pustaka

Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari jurnal, literatur dan sumber lain yang dapat dijadikan bahan masukan untuk mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data deskriptif kuantitatif adalah analisa data yang dapat dianalisis dengan non statistik maupun dengan statistik. Analisa data dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif masih bersifat non statistik, dan walaupun dikemukakan dengan angka-angka masih sangat sederhana yaitu baru frekuensi dan prosentase. Analisa statistik deskriptif merupakan statistik yang bertugas untuk mendeskripsikan atau

memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif sifatnya sangat sederhana dalam arti tidak menghitung dan tidak pula menggeneralisasikan hasil penelitian (Suharsini Arikunto, 2009 : 262-277)

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat SMA Negeri 2 Semarang

SMA Negeri 2 Semarang sebenarnya termasuk lama yang berasal dari pemecahan sekolah tertua di kota Semarang. Dahulu pada tahun 1950-an dikenal dengan nama SMA Bagian B (Pasti/Alam). **SMA NEGERI II** bersama dengan SMA Negeri I menempati bangunan gedung sekolah bekas HBS (Hogere Burger School). Gedung HBS ini dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda (zaman penjajahan Belanda) pada tahun 1937, dan diresmikan penggunaannya untuk sekolah (HBS) pada tanggal 1 Agustus 1939. Mulai tahun 1939 sampai tahun 1942 digunakan untuk sekolah HBS Pemerintah (Government HBS). Adanya anggapan seolah-olah Bagian B dan SMA Negeri I dan SMA Negeri II Semarang berasal dari HBS adalah kurang tepat. Maka di bawah ini secara singkat kami sampaikan perkembangan SMA Negeri yang terletak di Jalan Mentri Soepeno 1 Semarang tersebut sebagai berikut.

4.1.1.1 Zaman Penjajahan

- a. Tahun 1939-1942 (pada zaman penjajahan Belanda) digunakan untuk sekolah HBS Pemerintah Belanda.
- b. Tahun 1942 -1945 (zaman penjajahan Jepang) Oleh Pemerintah Jepang gedung HBS tersebut dipergunakan untuk sesama Sekolah Pendidikan Tentara Jepang.

4.1.1.2 Zaman Pendudukan Belanda

a. Tahun 1945 (Jepang menyerah kepada sekutu)

Belanda datang kembali di Indonesia bersama Sekutu pada tanggal 29 September 1945. Oleh Belanda gedung HBS, yang digunakan oleh Jepang untuk asrama dipergunakan untuk Rumah Sakit Tentara Belanda.

Catatan tambahan :

Tentara Inggris (Sekutu sejumlah 3 divisi (India Division) mendarat di Jakarta, untuk Jakarta, Surabaya dan Sumatera

b. Tahun 1946 – 1949

Gedung bekas HBS tersebut difungsikan kembali oleh Belanda untuk pendidikan antara lain untuk sekolah :

- 1) HBS (Hogere Burger School = Sekolah bagi Penduduk Kelas Atas)
- 2) AMS (Algemene Meddelbare School = Sekolah Menengah Umum)
- 3) VHO (Voorbereident Voor Hoger Onderwijs = Persiapan untuk Pendidikan yang lebih tinggi).
- 4) MS (Middelbare School = Sekolah Menengah) dibawah pimpinan seorang direktur Belanda bernama J. Marchant, kemudian J. Marchant digantikan oleh P. Vogelensang

4.1.1.3 Tahun 1949 (Pengakuan Kedaulatan RI)

Oleh putera-puteri Indonesia (guru-guru), telah dipersiapkan berdirinya SMA Negeri di Semarang. SMA yang dibentuk ini berasal dari peleburan sekolah-sekolah Swasta Nasional yang ada di Semarang, dan sebagai "intinya" adalah SMA Taman Siswa/Taman Madya Semarang.

4.1.1.4 Tahun 1949 - 1950

Diresmikan berdirinya SMA Negeri oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1950 dan menempati gedung bekas HBS di Jl. Taman Menteri Soepeno 1 Semarang, sebagai SMA Negeri Bagian B (Pasti/Alam) yang di pimpin oleh Bapak Soeroto dan SMA Negeri Bagian A (Bahasa) yang dipimpin oleh Bapak Soemadi. Ke dua sekolah ini bersama-sama menempati gedung HBS tersebut dengan pengaturan : SMA Bagian B berlangsung pagi hari, dan SMA bagian A berlangsung siang/sore.

Selanjutnya SMA Bagian A dipindahkan ke Jalan Pemuda 149 (dahulu Bodjong weg) dan saat ini dikenal dengan nama SMA Negeri 3 Semarang. (yang kemudian menjadi SMA Negeri 3 dan 4 Semarang). Pada saat itu tahun 1949 /1950, Tentara Pelajar (TP) dari daerah pedalaman diperintahkan masuk kota Semarang. Karena statusnya sebagai pelajar, maka untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya mereka ditampung pada SMA Negeri termasuk SMA Bagian A dan SMA Bagian B.

4.1.1.5 Tahun 1955 - 1956

Pada tahun 1955 SMA Negeri Bagian B dipecah menjadi 2 sekolah, keduanya tetap menempati satu bangunan gedung bekas HBS tersebut :

SMA Negeri 1 Bagian B, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3411 /B.II tanggal 1 Djuli 1955, dengan Kepala Sekolah Bp. M. Kartono (Dokumen SMU Negeri 1 Semarang).

SMA Negeri II Bagian B, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3414/B.II tanggal 1 Djuli 1955, dengan Kepala Sekolah Bp. M. Abdoelmadjid(dokumen di SMU Negeri 2 Semarang).

4.1.1.6 Perubahan menjadi SMA Negeri I dan SMA Negeri II

Pada tahun 1960 terjadi perubahan baik nama maupun status dari SMA Bagian B : SMA Negeri I Bagian B menjadi : SMA Negeri I dan SMA Negeri II Bagian B menjadi : SMA Negeri 2. Status SMA bagian B (Pasti / Alam) yang dulunya hanya mengenal 1 (satu) jurusan ilmu pasti / alam, dengan adanya perubahan tersebut kemudian masing-masing SMA mempunyai 4 (empat) jurusan, yaitu :

- a. jurusan Ilmu Pasti (PAS)
- b. jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (PAL)
- c. jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (SOS)

d. jurusan Ilmu Budaya / Bahasa (BUD)

Ke empat jurusan ini sering dikenal sebagai jurusan Pas / Pal / Sos / Bud.

Dengan perubahan ini murid kelas I pada tahun ajaran tersebut di atas mengarah pada 4 jurusan, sedangkan murid kelas II dan III menyelesaikan program lama (Bagian B sampai dengan tahun ajaran 1963 /1964).

4.1.2 Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang

4.1.2.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006, maka SMA Negeri 2 Semarang perlu segera menindaklanjuti dengan menyusun Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang, yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta Pedoman Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh BSNP. Hal ini ditempuh mengingat SMA Negeri 2 Semarang sejak tahun pelajaran 2003/2004 telah melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang biasa disebut Kurikulum 2004 dan pada tahun pelajaran 2006/2007 telah mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasar Kurikulum 2004. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bila dibandingkan dengan Kurikulum 2004 secara umum tidak berbeda jauh.

SMA Negeri 2 Semarang merupakan satuan pendidikan yang mempunyai banyak kelebihan sebagai modal yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan menjadi sekolah yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi dambaan masyarakat. Kelebihan itu terlihat pada lokasi bangunan yang sangat strategis, berada di wilayah Timur, dan Sarana-prasarananya pun cukup representatif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Demikian juga input yang diperoleh pada saat penerimaan peserta didik menunjukkan angka rata-rata benilai baik.

Pendidikan di SMA Negeri 2 Semarang akan berhasil apabila kegiatan belajar-mengajar mampu membentuk pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran dengan menggunakan tes dan nontes. Proses pembelajaran akan efektif apabila dilakukan melalui persiapan yang cukup dan terencana dengan baik supaya dapat diterima untuk memenuhi:

- a. kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat global,
- b. mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan global
- c. sebagai proses untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan semangat membangun berbagai aspek pendidikan serta dalam upaya menumbuhkan jiwa patriotisme yang rela berkorban demi kemajuan SMA Negeri 2 Semarang, maka diperlukan rencana dan strategi yang matang dalam bentuk Kurikulum SMA Negeri 2

Semarang yang berciri khas membentuk manusia yang cerdas, berakhlak, bertaqwa dan mencintai budayanya.

4.1.2.2 Landasan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 1,
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 49 ayat 1,
- c. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi,
- d. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan,
- e. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan 23,
- f. Program kerja SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2009 / 2010,

4.1.2.3 Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Semarang.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang terdiri dari tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oleh sebab itu kurikulum SMA Negeri 2 Semarang disusun oleh Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum yang dibentuk oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Kota Semarang.

Pengembangan Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

4.1.2.4 Tujuan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

Tujuan penyusunan dan pengembangan Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang adalah :

- a. Membuat seperangkat rencana dan peraturan yang digunakan sebagai acuan / pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sasaran pendidikan pada satu tahun pelajaran.
- b. Memberi panduan secara sistematis dalam mewujudkan program pendidikan yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), struktur dan muatan kurikulum, dan silabus mata pelajaran.
- c. Memberikan gambaran tentang keberadaan SMA Negeri 2 Semarang dengan ciri khas dan karakternya untuk menjadi pijakan dalam mengembangkan program pendidikan di masa yang akan datang.

4.1.2.5 Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang dikembangkan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

- b. Beragam dan terpadu.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi Kota Semarang, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi orang tua peserta didik dan gender. Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di daerah.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Semarang.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti komite sekolah, dinas pendidikan, dewan pendidikan, alumni maupun pihak perguruan tinggi untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, lembaga perguruan tinggi dan tuntutan global. Oleh karena itu, pengembangan ketrampilan pribadi, ketrampilan berpikir, ketrampilan sosial, dan ketrampilan akademik, merupakan suatu keharusan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang berusaha mendorong perkembangan sendi-sendi kehidupan peserta didik secara menyeluruh, baik untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Juga menyentuh sendi kehidupan jasmani dan rohani, mental dan spiritual, kebahagiaan dunia dan kehidupan di akherat kelak.

f. Belajar sepanjang hayat.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya dan untuk perbaikan hidup di masa yang akan datang.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah (Kota Semarang) untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sikap kebangsaan, persatuan dan kesatuan nasional untuk memperkuat keutuhan negeri ini. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah saling mengisi dan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu substansi kurikulum SMA Negeri 2 Semarang mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan kelas X, XI dan XII dalam rangka menyokong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta.

4.1.2.6 Prinsip Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara optimal, dinamis dan menyenangkan.
- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu:
 - 1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) belajar untuk memahami dan menghayati;
 - 3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
 - 4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain;
 - 5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani*, *ing madya mangun karsa*, *ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam sekitar menjadi sumber belajar* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

4.1.2.7 Visi SMA Negeri 2 Semarang

Dalam era Otonomi Daerah dan menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah SMA Negeri 2 Semarang berupaya

agar seluruh warga sekolah ikut peduli dan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun Visi SMA Negeri 2 Semarang yang dimaksud adalah **Terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi, berwawasan Iptek, Seni budaya dan Imtaq, serta mampu bersaing secara global**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas pada Bab II dinyatakan :

- a. Pasal 2 menyatakan : Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 3 menyatakan : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara.

Melalui visi ini diharapkan semua warga sekolah akan dapat mempunyai gambaran yang utuh dan nyata tentang keberadaan SMA Negeri 2 Semarang pada masa yang akan datang dan secara sadar dapat menjalin kerja sama antara Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, siswa serta Komite Sekolah untuk mewujudkan visi ini. Indikator yang digunakan sebagai acuan mewujudkan visi tersebut adalah :

- 1) Unggul dalam nilai Ujian Nasional,

- 2) Unggul dalam persaingan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri),
- 3) Unggul dalam lomba KIR (Karya Ilmiah Remaja)
- 4) Unggul dalam kompetisi berbahasa Inggris (Conversation, pidato dan debat),
- 5) Unggul dalam kelompok komunikasi teknologi (ICT),
- 6) Unggul dalam kreativitas seni dan budaya
- 7) Unggul dalam peningkatan budi pekerti luhur, iman dan taqwa.
- 8) Unggul dalam persaingan di tingkat nasional dan global

4.1.2.8 Misi SMA Negeri 2 Semarang

Untuk mewujudkan Visi SMA Negeri 2 Semarang diatas, sekolah menetapkan misi sekolah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga, setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- c. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal.
- d. Mendorong siswa untuk dapat aktif berbahasa inggris dalam rangka memasuki era global.
- e. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan berbasis ICT.

- f. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa, sehingga bertambah keimanan dan ketaqwaan dalam bertindak dan bertingkah laku.
- g. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan, siswa, maupun komite sekolah guna mencapai tujuan sekolah.

4.1.2.9 Tujuan Sekolah

Tujuan pendidikan yang dikembangkan di SMA Negeri 2 Semarang didasarkan pada Visi-Misi di atas dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas SDM terutama guru dan staf tata usaha
 - 1) Semua guru diikutkan pelatihan dalam mengajar menggunakan ICT sesuai dengan mata pelajaran masing-masing
 - 2) Semua staf tata usaha diikutkan pelatihan peningkatan kemampuan pengisian data sekolah dengan komputer (data entry)
 - 3) Semua guru dan karyawan diikutsertakan dalam kursus bahasa Inggris.
- b. Bidang Akademik
 - 1) Peningkatan kualitas pembelajaran dengan sistem ICT untuk memperoleh prestasi berupa :
 - (a) tetap mempertahankan prosentasi kelulusan (100%) dalam Ujian Nasional

(b) peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional ($\pm 0,25$) untuk tiap mata pelajaran.

2) Prestasi (kuantitas) outcome:

Meningkatkan jumlah lulusan yang dapat diterima di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang terbaik, (dalam maupun luar negeri) sebanyak 5 % tiap tahun, sehingga pada 5 tahun ke depan, 80% lulusan dapat terserap di perguruan tinggi, sebagaimana yang ditetapkan dalam misi sekolah.

b. Bidang pengembangan wawasan keilmuan

Pelatihan yang intensif untuk menghadapi lomba akademik dengan mencari bahan dari internet untuk lomba:

- 1) karya ilmiah
- 2) olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Komputer, Astronomi, Bahasa, dan Ekonomi.
- 3) lomba debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk lomba-lomba tersebut baru berhasil mencapai juara 1, 2, dan 3 pada tingkat kota, dan beberapa siswa masuk 10 besar tingkat propinsi dan tingkat nasional. Setiap tahun prosentase prestasi propinsi maupun tingkat nasional diprogramkan terus meningkat.

- 4) Non akademik (olah raga dan seni budaya)

4.1.3 Struktur dan Muatan Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang

4.1.3.1 Stuktur Kurikulum Kelompok Mata Pelajaran

Struktur dan muatan Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang sesuai dengan Standar Isi meliputi lima kelompok mata pelajaran seperti berikut :

- a. Kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia
- b. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian
- c. Kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kelompok mata pelajaran Estetika
- e. Kelompok mata pelajaran Jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 pasal 7.

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan seperti tabel berikut :

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	<p>Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.</p> <p>Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti KKN.</p>
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<p>Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di SMA Negeri 2 Semarang dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.</p>
4.	Estetika	<p>Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan</p>

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
		kebersamaan yang harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 2 Semarang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

f. Mata Pelajaran

1) Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia

Meliputi :

Agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu, mengingat kondisi sosial budaya masyarakat dilingkungan sekitar sekolah yang menuntut demikian.

Tujuan :

Memberikan wawasan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Juga dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup

etika, budi pekerti atau moral, sebagai perwujudan dari pengamalan pendidikan agama yang diyakininya.

2) Kewarganegaraan dan Kepribadian

Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan, termasuk wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi serta nepotisme.

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Ilmu Alam terdiri dari mata pelajaran : Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, TIK, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Program Ilmu Sosial terdiri dari mata pelajaran : Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, TIK, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Program Bahasa terdiri dari mata pelajaran : Matematika, Sastra Indonesia, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, Antropologi, Sejarah Budaya, TIK, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Tujuan : setiap kelompok mata pelajaran tersebut dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan dan kemandirian kerja.

4) Estetika

Terdiri dari mata pelajaran Seni Budaya meliputi Seni Rupa, Seni Tari dan Seni Musik, dan Keterampilan. Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan yang dimaksud meliputi apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

5) Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan

Terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 2 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, bebas asap rokok, HIV / AIDS,

Demam berdarah, muntaber, dan penyakit-penyakit lain yang berpotensi untuk mewabah di masyarakat.

Muatan kurikulum SMA Negeri 2 Semarang yang diberikan sesuai dengan struktur program kurikulum yang terdapat dalam Standar Isi seperti tabel berikut:

Tabel 4.1
Struktur Program Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang
Kelas X Tahun Pelajaran 2009/2010

Kelas X

Komponen	Alokasi Waktu	
	Semester 1	Semester 2
A. Mata Pelajaran		
1. Pendidikan Agama	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4
5. Matematika	4	4
6. Fisika	3	3
7. Biologi	3	3
8. Kimia	3	3

Komponen	Alokasi Waktu	
	Semester 1	Semester 2
9. Sejarah	1	2
10. Geografi	2	1
11. Ekonomi	3	3
12. Sosiologi	2	2
13. Seni Budaya (Program Pilihan)	2**	2**
a. Seni musik / Seni tari	2**	2**
b. Seni Rupa		
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
16. Bahasa Perancis	2	2
B. Muatan Lokal		
17. Bahasa Jawa	1	1
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)
Jumlah	42	42

Sumber : Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang

Keterangan : *) dilakukan diluar jam pelajaran.

***) untuk kelas X 1 – X 5 Semester 1 Seni Rupa, dan Seni Tari diberikan pada Semester 2, sedang kelas X 6 – X 10 Semester 1 Seni Tari, dan Seni Rupa diberikan pada Semester 2.

Penambahan jam maksimal 4 jam pada mata pelajaran Ujian Nasional yaitu ekonomi, fisika, kimia, dan biologi, dan geografi atas dasar hasil analisis pada SK-KD pada masing-masing mapel tsb melalui diskusi MGMP sekolah.

Jumlah jam Bahasa Jawa (muatan lokal) dikurangi 1 jam untuk penambahan jam di atas karena hasil analisis SK-KD pada Bahasa Jawa beberapa KD mengulangi pencapaian kompetensi pada tingkat sebelumnya (di SLTP).

Tabel 4.2
Struktur Program Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang
Kelas XI dan XII Program IATahun Pelajaran 2009/2010

Kelas XI dan XII program IA

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	6	6	6	6
6. Fisika	5	5	5	5
7. Kimia	5	5	5	5
8. Biologi	5	5	5	5
9. Sejarah	1	1	1	1
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/Bahasa Asing lain				

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
- Bahasa Perancis	1	1	-	-
- Bahasa Jepang	-	-	1	1
B. Muatan Lokal				
14 - Bahasa Jawa	1	1	1	1
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	42	42	42	42

Sumber : Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang

Keterangan :*) dilakukan diluar jam pelajaran.

Penambahan jam maksimal 4 jam pada mapel Ujian Nasional yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi, atas dasar hasil analisis konteks pada SK-KD pada masing-masing mapel tsb melalui diskusi MGMP sekolah yang memerlukan tambahan waktu untuk pencapaian kompetensi.

Jumlah jam Bahasa Jawa (muatan lokal) dan Bahasa Asing (Bahasa Prancis dan Bahasa Jepang) masing-masing dikurangi 1 jam untuk penambahan jam di atas karena hasil analisis SK-KD pada Bahasa Jawa cukup diperlukan waktu 1 jam untuk pencapaian kompetensi. Sedangkan hasil analisis SK-SD Bahasa Prancis maupun Bahasa Jepang untuk pencapaian kompetensi yang merupakan penguatan dari apa yang telah dicapai di kelas sebelumnya cukup memerlukan waktu 1 jam pelajaran.

Tabel 4.3
Stuktur Program Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang
Kelas XI dan XII Program IS Tahun Pelajaran 2009/2010

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Sejarah	3	3	3	3
7. Geografi	4	4	4	4
8. Ekonomi	7	7	7	7
9. Sosiologi	4	4	4	4
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Bahasa Perancis	1	1	-	-
14. Bahasa Jepang	-	-	1	1
B. Muatan Lokal				
15. Bahasa Jawa	1	1	1	1
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	42	42	42	42

Sumber : Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang

Keterangan : *) dilakukan diluar jam pelajaran.

Penambahan jam maksimal 4 jam pada mapel Ujian Nasional yaitu ekonomi, geografi, dan sosiologi, atas dasar hasil analisis pada SK-KD pada masing-masing mapel tsb melalui diskusi MGMP sekolah.

Jumlah jam Bahasa Jawa (muatan lokal) dikurangi 1 jam untuk penambahan jam di atas karena hasil analisis SK-KD pada Bahasa Jawa beberapa KD mengulangi pencapaian kompetensi pada tingkat sebelumnya.

4.1.3.2 Muatan Lokal

4.1.3.2.1 Pengertian

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak selalu menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh sekolah, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga sekolah mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk muatan lokal yang diselenggarakan. Sekolah menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal yaitu bahasa jawa setiap semester di semua jenjang pendidikan.

4.1.3.2.2. Konsep Pengembangan

Pengembangan muatan lokal di SMA Negeri 2 Semarang memperhatikan potensi Kota Semarang yang memperhatikan (1) Sumber Daya Alam (SDA); (2) Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Geografis yang berupa pantai; (4) Budaya; dan (5) Historia.

a. Keterkaitan Muatan lokal dengan Potensi SDA

Sumber Daya Alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan udara yang dalam bentuk asalnya dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan. Contoh untuk bidang: peternakan (a.l. unggas, sapi, kambing dll.) dan perikanan (a.l. ikan laut/tawar, tumbuhan laut, terumbu karang dll.)

b.. Keterkaitan Muatan Lokal dengan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar menjadi makhluk sosial adaptif (mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan sosial budaya) dan transformatif (mampu memahami, menterjemahkan, dan mengembangkan

seluruh pengalaman dan kontak sosialnya bagi kemaslahatan diri dan lingkungannya pada masa depan), sehingga mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan.

Aspek SDM menjadi penentu keberhasilan dari semua aspek/potensi muatan lokal, karena SDM sebagai sumber daya dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap kualitas muatan lokal yang akan dikembangkan, bergantung kepada paradigma, kultur, dan etos kerja SDM yang bersangkutan. Tidak ada realisasi dan implementasi muatan lokal tanpa melibatkan dan memposisikan manusia sebagai aspek sentral dalam proses pencapaiannya.

c. Keterkaitan Muatan Lokal dengan Potensi Geografis

Proses pengkajian muatan lokal ditinjau dari aspek geografis perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek oseanologi (potensi kelautan), antropologi (ragam budaya daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pariwisata), ekonomi (meningkatkan kehidupan/ taraf hidup masyarakat setempat) dan demografi (daerah/obyek wisata). Aspek-aspek dimaksud merupakan salah satu aspek penentu dalam menetapkan potensi muatan lokal

d Keterkaitan Muatan Lokal dengan Potensi Budaya

Budaya merupakan suatu sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Untuk itu, salah satu sikap menghargai kebudayaan suatu daerah adalah upaya masyarakat setempat untuk melestarikan dan menonjolkan ciri khas budaya daerah menjadi muatan lokal. Sebagai contoh muatan yang berkaitan dengan aspek budaya, antara lain sebagai upacara adat ruwatan dll.

e. Keterkaitan Muatan Lokal dengan Historis

Potensi Historis merupakan potensi sejarah dalam wujud peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi arena/wahana wisata yang bisa menjadi aset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan pelestarian terhadap nilai-nilai tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi bagian dari muatan lokal. Misalnya, SMA Negeri 2 Semarang dapat mengembangkan muatan lokal kepariwisataan melalui wisata di kota lama.

4.1.3.2.2. Acuan Pengembangan Diri

Muatan Lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Semarang berdasarkan:

- a. SDA, SDM, potensi dan kebutuhan Kota Semarang yang mencakup aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), ekologi,dll;
- b. kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik;
- c. Ketersediaan daya dukung/potensi sekolah (internal) antara lain:
 - 1) Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang yang memuat mata pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa);
 - 2) Sarana prasarana: ruang belajar, peralatan praktik, media pembelajaran, buku/bahan ajar sesuai dengan mata pelajaran Muatan Lokal yang diselenggarakan;
 - 3) Ketenagaaan dengan keahlian sesuai tuntutan mata pelajaran Muatan Lokal
 - 4) Biaya operasional pendidikan yang diperoleh melalui berbagai sumber.
- d. Ketersediaan daya dukung eksternal antara lain:

- 1) Dukungan Pemerintah Kota Semarang berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/pembiayaan;
- 2) Stakeholders yang memiliki kepedulian untuk mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan mata pelajaran Muatan Lokal, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- 3) Nara sumber yang memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan mata pelajaran Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh sekolah;
- 4) Satuan Pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi.

4.1.4 Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi SMA Negeri 2 Semarang. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui:

- a. Kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karier peserta didik.

Pengembangan diri bagi peserta didik SMA Negeri 2 Semarang terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.

- b. Kegiatan pengembangan pribadi dan kreatifitas siswa dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang meliputi kegiatan:

Wajib:

- 1) ECC(English Conversation Course) Alasan: mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dalam Bahasa Inggris secara berkelanjutan sesuai dengan program RSBI
- 2) Pramuka. Alasan: karena Pramuka merupakan wadah pembinaan kesiswaan yang melatih semua aspek perkembangan pembinaan kesiswaan seperti: kepemimpinan, kemandirian, kreatifitas, kemasyarakatan, sosial, kewirausahaan dan keilmuan.

Pilihan:

- 1) Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Katolik) Alasan: untuk mewadahi siswa dalam mengembangkan ilmu keagamaan sesuai dengan keyakinannya.
- 2). Keolahragaan (Foot Sail, Bulu Tangkis, Basket, Bola Voli, Bela diri, Pencak Silat, Tennis Lapangan) Alasan: untuk mewadahi siswa dalam mengembangkan bakat keolahragaan yang sesuai dengan minat untuk memperoleh prestasi olah raga yang lebih baik.
- 3) Kepemimpinan (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa/LDKS, Paskibra, Palang Merah Remaja) Alasan: untuk mengembangkan kepemimpinan, manajemen dan kedisiplinan.

- 4) Seni (Teater, Paduan Suara, Band, Tarian Daerah, Seni Lukis, Sinematografi) Alasan: untuk menyalurkan bakat seni siswa sesuai dengan minatnya.
- 5) Pencinta alam. Alasan: untuk mewadahi siswa dalam meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan.
- 6) Majalah (kelompok majalah kreasi dan fotografi) Alasan: untuk mewadahi siswa dalam mengembangkan bakat jurnalis dan fotografi.
- 7) Kelompok Ilmiah Remaja (pengembangan keilmuan murni seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan ilmu sosial) Alasan: untuk mewadahi siswa dalam meningkatkan bakat siswa dalam mengembangkan keilmuan dan pengetahuan.
- 8) Kelompok kemampuan berkomunikasi (Bahasa Perancis/FCC, Bahasa Jepang) Alasan: untuk mewadahi siswa dalam mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi global.

Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Semarang. Segala aktifitas peserta didik berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler di bawah pembinaan dan pengawasan guru pembina yang telah ditugasi oleh Kepala Sekolah.

4.1.5 Program Pengembangan Diri

4.1.5.1 Pengertian Pengembangan Diri

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial.

Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan konseling difasilitasi/dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Pengembangan diri melalui kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

4.1.5.2 Tujuan Pengembangan Diri

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pengembangan diri ialah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah / madrasah.

b. Tujuan Khusus

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan :

- 1) Bakat, minat dan kreativitas
- 2) Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan
- 3) Kemandirian
- 4) Kemampuan kehidupan keagamaan
- 5) Kemampuan sosial
- 6) Kemampuan belajar
- 7) Wawasan dan perencanaan karir
- 8) Kemampuan pemecahan masalah

c. Metode yang digunakan

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan metode :

- 1) Diskusi
- 2) Bermain peran
- 3) Tanya jawab
- 4) Pemecahan masalah
- 5) Ceramah
- 6) Metode lain yang sesuai

4.1.5.3 Pengembangan Diri Melalui Pelayanan Konseling

a. Pengertian Konseling

Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

b. Bidang Pelayanan Konseling

Bidang pelayanan konseling meliputi:

1) Pengembangan Kehidupan Pribadi

Adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis.

2) Pengembangan Kehidupan Sosial

Adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sosial yang lebih luas.

3) Pengembangan Kemampuan Belajar

Adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri.

4) Pengembangan Karir

Yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

c. Fungsi Konseling

Fungsi Kegiatan Konseling meliputi :

- 1) Fungsi Pemahaman, yaitu untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.
- 2) Fungsi Pencegahan, yaitu untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
- 3) Fungsi Pengentasan, yaitu untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.
- 4) Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.
- 5) Fungsi Advokasi, yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

d. Jenis Layanan Konseling

- 1) Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah peran peserta didik di lingkungan yang baru.
- 2) Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir serta pendidikan lanjutan.
- 3) Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang

tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, dan kegiatan ekstra kurikuler.

- 4) Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat.
- 5) Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadi.
- 6) Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
- 7) Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
- 8) Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik
- 9) Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.

4.1.5.4 Topik Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di dalam kelas, maka topik-topik yang dapat diangkat antara lain sebagai berikut:

1. Mengisi waktu senggang
2. Menghadapi dan memecahkan masalah dalam kehidupan
3. Mengenal dan memahami diri
4. Remaja dan masalahnya
5. Bahaya pergaulan bebas
6. Memahami potensi diri
7. Belajar dari orang-orang sukses
8. Cara melaksanakan shalat khusyu'
9. Menjadi pengusaha yang amanah

4.1.5.5 Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler

4.1.5.5.1 Pengertian Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.

a. Visi dan Misi

1) Visi

Visi kegiatan ekstra kurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

2) Misi

- (a) Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka
- (b) Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau kelompok.

b. Fungsi Kegiatan Ekstra Kurikuler

- a. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan kemampuan dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka.
- b. Sosial, yaitu fungsi ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.

- c. Rekreatif, yaitu fungsi ekstra kurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, menggembarakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan.
- d. Perisapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik.

c. Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler

- a. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing.
- b. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik.
- c. Keterlibatan Aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara utuh
- d. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler dalam suasana yang disukai dan menggembarakan peserta didik
- e. Etos Kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil

- f. Kemanfaatan Sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat

d. Jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler

- a. Krida, meliputi, kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
- b. Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian.
- c. Latihan/Lomba Keberbakatan/Prestasi, meliputi pengembangan bakat olah raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan
- d. Seminar, lokakarya dan Pameran/Bazar, dengan substansi antara lain karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya.

e. Format Kegiatan

- a. Individual, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik secara perorangan
- b. Kelompok, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik

- c. Klasikal, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu kelas
- d. Gabungan, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik antar kelas/antar sekolah

f. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang memuat unsur-unsur:

- a. Sasaran kegiatan
- b. Substansi kegiatan
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak yang terkait serta keorganisasiannya
- d. Waktu dan tempat
- e. Sarana dan pembiayaan.

g. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Kegiatan Ekstra kurikuler yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan dilaksanakan secara langsung oleh guru, konselor, dan tenaga kependidikan di sekolah.
- 2) Kegiatan ekstra kurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pelaksanaan.

h. Penilaian kegiatan

Hasil dan proses kegiatan ekstra kurikuler dinilai secara kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan.

i. Pengawasan Kegiatan

- 1) Kegiatan ekstra kurikuler di sekolah / madrasah dipantau, dievaluasi dan dibina melalui kegiatan pengawasan.
- 2) Pengawasan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan secara intern yaitu oleh kepala sekola/madrasah dan ekstern oleh pihak yang secara struktural/fungsional memiliki kewenangan membina kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud.
- 3) Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis dan ditindak lanjuti untuk penngkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling

4.2 Proses dan Hasil Analisa

4.2.1 Gambaran Responden

Secara umum responden dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa jumlah responden sebanyak 165 siswa yang tersebar di kelas XI dan dikategorikan berdasarkan umur, jenis kelamin dan agama, sebagaimana tersebut tabel di bawah ini.

a. **Responden berdasarkan umur**

Tabel 4.5
Responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Prosentase
1	15 tahun	18	11
2	16 tahun	124	75
3	17 tahun	22	13
3	18 tahun	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari identitas responden

Responden sebagian besar berusia 16 tahun yang menduduki urutan pertama dengan jumlah 124 siswa atau 75 % dari jumlah responden 165 siswa, menyusul urutan kedua usia 17 tahun sebanyak 22 siswa atau 13 % sedangkan yang berusia 15 tahun sebanyak 18 siswa atau 11 % dan 1 siswa yang berusia 18 tahun atau 1 %. Pada usia 16 tahun dan 17 tahun mereka belum memiliki hak pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 maupun Pilpres 2009, tetapi pada Pemilihan Walikota Semarang pada bulan April 2009 yang akan datang sudah dipastikan memiliki hak pilih yang pertama kalinya, artinya usia kelompok ini sangat potensial sebagai pemilih pemula. Sedangkan satu siswa yang berusia 18 tahun sudah memiliki hak pilih pada Pemilu Legislatif 2009 dan Pilpres 2009.

b. **Responden berdasarkan jenis kelamin**

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Perempuan	110	67
2	Laki-laki	55	33
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari identitas responden

Komposisi jenis kelamin responden paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 110 siswa atau 67 %, sedangkan jumlah laki-laki 55 siswa atau 33 %. Hal ini memang tidak jauh berbeda dengan komposisi keseluruhan kelas XI dengan jumlah 414 siswa, 265 siswa perempuan atau sebesar 64 % dan laki-laki 149 siswa atau 36 %.

Demikian juga tidak jauh berbeda komposisinya jenis kelamin jika dilihat dari keseluruhan jumlah siswa kelas X, XI dan kelas XII yang berjumlah 1204 siswa dengan komposisi 63 % siswa perempuan atau sejumlah 759 siswa dan 37 % siswa laki-laki atau sejumlah 445 siswa.

c. Responden berdasarkan agama

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	153	92
2	Kristen	6	4
3	Khatolik	6	4

4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari identitas responden

Responden dalam penelitian ini memang didominasi oleh siswa yang beragama Islam yaitu 153 siswa atau 92 % dari 165 siswa, 4 % beragama Kristen atau 6 siswa dan 4 % beragama Khatolik atau 4 %. Peneliti secara acak memberikan kuesioner kepada siswa tidak berdasarkan agama, dengan demikian maka peneliti tidak bermaksud diskriminasi atau membeda-bedakan agama.

4.2.2 Analisa Data

a. Sosialisasi Politik

Tabel 4.8

Informasi isu-isu politik dari keluarga

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	64	39
2	Kadang-kadang	96	58
3	Tidak pernah	5	3
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.1

Dalam lingkungan keluarga para siswa yang sering menerima informasi isu-isu politik sebanyak 64 siswa atau 39 % dari 165 responden, ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi keluarga yang menyangkut isu politik selalu diinformasikan kepada anggota keluarga. Sedangkan 96 siswa atau 58 % menduduki peringkat pertama bahwa isu-isu politik yang dimiliki oleh keluarga tidak selalu diinformasikan kepada anggota keluarga yang lain dan 5 siswa atau 3 % mengatakan tidak pernah menerima isu-isu politik dari lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang pertama dalam lingkungan keluarga, dimana sejak usia anak-anak sampai dengan remaja Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan-keputusan yang di buat itu bisa otoritatif dalam arti, keengganan untuk mematuhiya dapat mengundang hukuman

Tabel 4.9
Mendiskusikan isu-isu politik dengan keluarga

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	39	24
2	Kadang-kadang	114	69
3	Tidak pernah	12	7
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.2

Ketertarikan siswa dalam diskusi politik dalam lingkungan keluarga ternyata terdapat 114 siswa atau 69 % kurang tertarik atau hanya kadang-kadang saja untuk mendiskusikan isu-isu politik dari sejumlah responden 165 siswa. Tetapi yang tertarik dan sering mendiskusikan isu-isu politik dalam keluarga hanya 39 siswa atau 24 % bahkan yang tidak pernah sama sekali tertarik untuk mendiskusikan isu politik dalam keluarga sebanyak 12 siswa atau 7 %.

Dengan demikian maka sebenarnya keluarga sebagai agen sosialisasi politik sudah cukup baik, walaupun yang menjawab kadang-kadang paling banyak. Sehingga jika digabungkan dengan yang menjawab sering, maka dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan keluargapun isu-isu politik juga menarik untuk didiskusikan oleh mereka.

Tabel 4.10
Pengambilan keputusan dalam keluarga

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	91	55
2	Kadang-kadang	66	40
3	Tidak pernah	8	5
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.3

Dengan melihat tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa keterlibatan siswa sebagai anggota keluarga pada pengambilan keputusan dalam lingkungan keluarga sangat menggembirakan, karena yang sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan sebanyak 91 siswa atau 55 %, hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi dan pendidikan politik dalam lingkungan keluarga sangat baik.

Akan tetapi ada 66 siswa atau 40 % yang hanya kadang-kadang diikutkan dalam pengambilan keputusan keluarga, hal ini menunjukkan bahwa siswa sebagai anggota keluarga belum dianggap penting untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 8 siswa atau 5 % tidak pernah diikutkan dalam pengambilan keputusan keluarga, hal ini tidak baik untuk pendidikan politik dalam keluarga, mengingat keikutsertaan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari pembelajaran demokrasi dalam kehidupan keluarga.

Tabel 4.11
Memutuskan suatu masalah dalam keluarga

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	84	51
2	Kadang-kadang	69	42
3	Tidak pernah	12	7

	Jumlah	165	100
--	--------	-----	-----

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.4 yang

Dalam memutuskan suatu masalah dalam keluarga, ternyata dari 165 responden yang sering dimintai pendapatnya oleh orang tua sejumlah 84 siswa atau 51 % dan menduduki peringkat pertama, artinya komunikasi dalam keluarga sangat baik. Komunikasi yang dibangun memberikan kepercayaan kepada anggota keluarga untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga keputusan yang dihasilkanpun juga menjadi bagian tanggung jawab anggota keluarga.

Berbeda dengan 69 siswa atau 42 % yang kadang-kadang dimintai pendapatnya oleh orang tua dalam memutuskan suatu masalah, ini memperlihatkan bahwa ketebukaan dalam kehidupan keluarga juga belum sepenuh hati untuk mendengar pendapat dari anggota keluarga yang merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Sedangkan yang tidak pernah sama sekali dimintai pendapatnya sebagai anggota keluarga dalam memutuskan suatu masalah sebanyak 12 siswa atau 7 %, artinya kelompok ini tidaklah penting untuk didengar pendapatnya guna memutuskan suatu masalah dalam keluarga.

Tabel 4.12
Mendiskusikan pelajaran yang berkaitan
dengan politik di Sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	64	39
2	Kadang-kadang	94	57
3	Tidak pernah	7	4
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.5

Sekolah merupakan agen sosialisasi politik selain melalui keluarga sebagai yang pertama dan utama dalam kehidupan keluarga. Melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan siswa dapat memperoleh pendidikan politik yang benar secara akademik, sehingga ada ketertarikan untuk mendiskusikannya pada setiap kesempatan, baik melalui diskusi kelompok dalam kelas maupun diskusi bebas di luar kelas.

Jika dilihat dari tabel 4.7 tersebut di atas, ternyata yang tertarik dan sering mendiskusikan pelajaran yang berkaitan dengan politik ada 64 siswa atau 39 %. Kelompok ini sangat senang dengan diskusi politik dan rasa ingintahunya sangat besar tentang politik, sehingga dalam suatu kesempatan diskusi kelompok ini akan tampil sangat baik untuk mengangkat isu politik terkini dan membahasnya.

Akan tetapi ada yang tidak begitu tertarik atau yang kadang-kadang mendiskusikan pelajaran yang berkaitan dengan politik lebih banyak dibandingkan dengan yang sering mendiskusikan yaitu 94 siswa atau 57 %, artinya separoh lebih siswa hanya kadang-kadang saja mendiskusikan atau jika perlu saja bahkan mungkin menunggu tugas dari guru pengajarnya untuk diskusi. Hal ini masih lebih baik, karena masih mau mendiskusikan dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah mendiskusikan politik di sekolah sebanyak 7 siswa (4 %).

Tabel 4.13
Tingkat aktifitas organisasi di Sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	105	63,6
2	Cukup Baik	59	35,8
3	Kurang Baik	1	0,6

	Jumlah	165	100
--	--------	-----	-----

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.6

Kiranya cukup menggembirakan bahwa 63 % atau 105 siswa dari 165 responden memberikan penilaian tentang tingkat aktifitas organisasi di sekolah baik, artinya bahwa kegiatan organisasi yang ada di sekolah memberikan pengalaman nyata yang sangat baik bagi pembentukan karakter warga negara.

Sementara 35,8 % atau 59 siswa memberikan penilaian cukup baik, berarti kelompok ini kurang merasakan manfaat dalam berorganisasi, sedangkan 1 siswa atau 0,6 % memberikan penilaian kurang baik bahkan mungkin tidak perlu berorganisasi di sekolah karena tidak ada manfaatnya dalam kehidupan siswa baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Tabel 4.14
Tema-tema politik dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Senang	143	87
2	Kurang Senang	22	13
3	Tidak Senang	0	0
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.7

Sebagian besar siswa senang dengan tema-tema politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan, ini terbukti dari 165 responden terdapat 143 siswa atau 87 % senang dengan tema-tema politik dan yang kurang senang sebanyak 22 siswa atau 13 % dan yang menyatakan tidak senang tidak ada atau nol.

Tabel 4.15
Membaca surat kabar

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
----	---------	-----------	------------

			(%)
1	Sering	50	30
2	Kadang-kadang	110	67
3	Tidak pernah	5	3
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.1

Surat kabar atau media cetak ternyata tidak banyak diminati oleh para siswa untuk dibaca, dari 165 responden hanya 50 siswa atau 30 % yang sering membaca surat kabar, bahkan yang tidak sering atau kadang-kadang membaca lebih banyak dan menduduki peringkat pertama yaitu 67 % atau 110 siswa, bahkan yang tidak pernah membaca surat kabar ada 5 siswa atau 3 %.

Tabel 4.16
Mengikuti berita politik melalui media

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	96	58
2	Kadang-kadang	68	41
3	Tidak pernah	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.2

Berita-berita politik ternyata sangat diminati oleh para siswa, terdapat 96 siswa atau 58 % dari 165 responden sering mengikuti berita-berita politik melalui media, baik media massa maupun media elektronik, sedangkan 41 % atau 68 siswa hanya kadang-kadang mengikuti berita politik melalui media dan 1 siswa atau 1 % tidak pernah mengikuti.

Mengikuti berita politik dapat menambah wawasan seorang siswa tentang dunia politik yang sedang berkembang baik politik lokal maupun politik

nasional. Semakin sering mengikuti berita-berita politik semakin mudah menganalisis politik dan mengkritisi melalui pembelajaran politik di sekolah.

Tabel 4.17
Mendiskusikan isi berita politik

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	29	17,6
2	Kadang-kadang	125	75,8
3	Tidak pernah	11	6,6
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.3

Jika dilihat dan dibandingkan dengan tabel 4.10, maka pada tabel 4.11 berbanding terbalik, karena ternyata yang sering mendiskusikan isi berita politik hanya 29 siswa atau 17,6 %, bahkan yang kadang-kadang mendiskusikan isi berita politik jumlahnya paling banyak yaitu 125 siswa atau 75,8 % sedang yang tidak pernah tertarik untuk mendiskusikan isi berita politik sebanyak 11 siswa atau 6,6 %. Dengan demikian maka para siswa tidak begitu tertarik untuk mendiskusikan isi berita-berita politik yang diperoleh melalui media, baik media massa maupun media elektronik.

Tabel 4.18
Mengikuti acara debat politik di Televisi

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	40	24,2
2	Kadang-kadang	98	59,4
3	Tidak pernah	27	16,4
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.4

Debat politik yang ditayangkan oleh Televisi juga tidak banyak diminati oleh para siswa, hanya 24,2 % atau 40 siswa yang sering mengikuti acara debat politik di televisi, sedangkan yang kadang-kadang mengikuti acara debat politik lebih banyak yaitu sebesar 59,4 % atau 98 siswa dan yang tidak pernah mengikuti acara debat politik sebanyak 27 siswa atau 16,4 %.

Acara debat politik yang ditayangkan oleh Televisi pada umumnya pada jam-jam efektif siswa belajar, sehingga siswa lebih mengutamakan belajar dari pada mengikuti acara debat politik, walaupun ada 40 siswa yang sering mengikuti acara tersebut. Mungkin juga tidak menarik tema debatnya atau nara sumbernya bahkan mungkin tidak cocok atauran debatnya, sehingga cukup menjemukan dan membosankan bagi para siswa untuk mengikutinya. Etika politik para politisipun juga tidak mencerminkan wakil rakyat yang terhormat, karena sering memperlihatkan kata-kata yang tidak pantas bagi politisi yang notabene adalah wakil rakyat yang mengedepankan emosi ketimbang logika.

Tabel 4.19
Menganalisis dan mengkritisi berita politik

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	43	26
2	Kadang-kadang	94	57
3	Tidak pernah	28	17
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.5

Kemampuan untuk menganalisa dan mengkritisi berita politik sudah baik, ini terbukti ada 43 siswa atau 26 % dari 165 responden yang sering menganalisa dan mengkritisi berita politik, sedangkan yang kadang-kadang lebih

banyak jumlahnya yaitu sebesar 94 siswa atau 57 % dan yang tidak pernah melakukan analisis dan mengkritisi berita politik ada 28 siswa atau 17 %.

Bagi siswa sebenarnya sudah sangat baik pada tingkat pemahaman mengenai politik, karena memiliki kemampuan untuk menganalisa bahkan sudah ada kemampuan dan keberanian untuk mengkritisi. Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan para siswa dalam setiap memahami berita-berita politik, tentu akan menjadi pendidikan politik yang baik dan benar serta bermartabat. Pembentukan karakter siswa dari kebiasaan menganalisis akan menjadikan siswa memiliki sikap yang kritis. Kritis yang dimaksud adalah peka terhadap situasi dan memiliki ketajam dalam menganalisis suatu masalah serta tepat dalam mengantisipasi.

Tabel 4.20
Mengikuti kampanye partai politik/pilpres

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	11	6,6
2	Kadang-kadang	26	15,8
3	Tidak pernah	128	77,6
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.6

Kampanye partai politik atau Pilpres bagi para siswa tidak menarik untuk diikuti, karena hanya ada 11 siswa atau 6,6 % yang sering mengikuti kampanye, sedangkan yang kadang-kadang mengikuti kampanye pun juga tidak banyak hanya 26 siswa atau 15,8 % dan yang tidak pernah mengikuti kampanye jumlah paling banyak yaitu 128 siswa atau 77,6 %.

Mengikuti kampanye partai politik atau pilpres bagi para siswa pada umumnya kurang menarik karena mereka belum memiliki hak pilih atau belum menjadi partisan atau bahkan mungkin tidak diijinkan oleh orang tua mereka karena dianggap belum cukup dewasa.

b. Pembelajaran Politik

Pengalaman politik yang diperoleh siswa melalui pembelajaran politik sangat bermanfaat bagi siswa dalam menentukan sikap politiknya, baik dalam kegiatan siswa dalam berorganisasi non politik maupun siswa kelak dikemudian hari menekuni aktifitas yang berkaitan langsung dengan politik

Tabel 4.21

Memahami tentang cara memilih sebagai pemilih dalam Pemilu maupun Pilkada

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	98	59,4
2	Cukup Baik	63	38,2
3	Kurang Baik	4	2,4
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner A.8.7

Hasil pembelajaran politik tentang tatacara memilih dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah ternyata sangat menggembirakan, dari 165 responden 98 siswa atau 59,4 % memahami dengan baik cara memilih sebagai pemilih dalam Pemilu maupun Pilkada. Cukup baik dalam memahami cara memilih sebagai pemilih sebanyak 63 siswa atau 38,2 % sedangkan 4 siswa atau 2,4 % kurang baik dalam memahami tentang cara memilih sebagai pemilih.

Sebagai pemilih pemula tentu ingin segera menggunakan haknya dan akan memberikan pengalaman pertama kalinya dalam pesta demokrasi atau dalam suatu pemilihan. Potensi pemilih pemula sangat rawan jika tidak dibekali dengan pendidikan politik yang baik, sehingga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggunakan hak politiknya, baik hak untuk memilih saat ini maupun nanti kemudian hari dipercaya untuk dipilih.

Tabel 4.22
Memiliki informasi tentang perkembangan politik di Indonesia

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	40	24,2
2	Cukup Baik	111	67,3
3	Kurang Baik	14	8,5
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner B.2

Perkembangan politik di Indonesia sangat dinamis sejak masa reformasi, artinya dinamika politik sangat cepat perkembangannya seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Namun dalam penelitian ini hanya 40 siswa atau 24,2 % saja yang memiliki informasi dengan baik tentang perkembangan politik di Indonesia, bahkan yang cukup baik memiliki informasi sebanyak 111 siswa atau 67,3 % dan ternyata ada yang kurang baik memiliki perkembangan politik di Indonesia yaitu sebanyak 8,5 % atau 14 siswa.

Yang memiliki cukup baik informasi perkembangan politik di Indonesia menduduki peringkat kedua, artinya para siswa kebanyakan kurang

memperdulikan perkembangan politik yang berkembang, meskipun sesekali juga tertarik untuk mengikutinya.

Sebagian siswa yang sangat peduli dan selalu mengikuti perkembangan politik di Indonesia hanya 40 siswa. Walaupun hanya 24,2 % saja, tetapi sebagai kawula muda atau politik remaja sudah baik mengingat pada umumnya remaja memang bersikap kurang peduli dengan perkembangan politik.

Tabel 4.23

Memahami isu-isu penting yang dihadapi oleh Negara Indonesia

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	48	29
2	Cukup Baik	94	57
3	Kurang Baik	23	14
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner B.3

Hasil penelitian tentang pemahaman isu-isu penting yang dihadapi oleh negara Indonesia yang terdapat pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa 48 siswa atau 29 % dari 165 responden telah memahami dengan baik, akan tetapi lebih dari separoh responden menyatakan cukup baik cara memahami isu-isu penting yang dihadapi oleh negara yaitu sebanyak 94 siswa atau 57 % dan yang kurang memahami ada 23 siswa atau 14 %.

Dengan gambaran tersebut di atas maka yang paling banyak dari responden adalah menyatakan cukup baik cara memahami isu-isu penting yang dihadapi oleh negara. Tidak sulit kiranya para siswa dalam memperoleh isu-isu yang dihadapi oleh negara baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.

Tabel 4.24

Termotivasi untuk aktif dalam kegiatan sosial

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	100	60,6
2	Cukup Baik	57	34,5
3	Kurang Baik	8	4,9
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner B.4

Motivasi untuk aktif dalam kegiatan sosial dari 165 responden menyatakan baik yaitu sejumlah 100 siswa atau 60,6 % dan yang menyatakan cukup baik termotivasi sebesar 57 siswa atau 34,5 % dan yang kurang baik atau kurang termotivasi untuk aktif dalam kegiatan sosial ada 8 siswa atau 4,9 %. Dengan demikian maka sebagian besar siswa atau separoh lebih sangat termotivasi untuk melakukan kegiatan sosial baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Kepedulian, toleran dan tenggangrasa serta rasa setiakawan yang diwujudkan dalam kegiatan sosial ternyata sudah menjadi kebiasaan sangat baik, hal ini perlu dikembangkan dan dijaga agar kebiasaan tersebut terus membudaya yang pada akhirnya menjadi karakter dan kepribadian siswa yang tanggap, tangguh dan tanggon serta peka terhadap segala permasalahan yang membutuhkan kepedulian.

Tabel 4.25

Terdorong untuk melakukan berbagai kegiatan organisasi di sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	51	31
2	Cukup Baik	89	54
3	Kurang Baik	25	15
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner B.5

Dorongan untuk melakukan berbagai kegiatan politik bagi para siswa dalam penelitian ini sebagian besar atau separoh lebih menyatakan cukup baik yaitu sejumlah 89 siswa atau 54 % dan yang menyatakan baik sebesar 51 siswa atau 31 %, sedangkan yang menyatakan kurang baik ada 25 siswa atau 15 %.

Kegiatan politik yang dilakukan oleh para siswa tentu bukanlah politik praktis akan tetapi bagian dari sosialisasi politik tidak langsung yang diwujudkan dalam magang, yaitu bentuk aktivitas non politik berupa kegiatan organisasi kesiswaan yang nantinya akan mempengaruhi siswa ketika berhubungan dengan politik.¹ Dalam organisasi tersebut mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, dan membuat keputusan, kegiatan ini akan sangat membantu manakala para siswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik praktis.

c. Pengetahuan Politik

Tabel 4.26

Mengetahui partai pemenang Pemilu Legislatif 2009

¹ Wawancara dengan Syamsul Sigit Klas XI.Ia7 “ Banyak sekali manfaat yang saya peroleh dan ada manfaat yang bisa langsung saya rasakan. Dengan ikut aktif di organisasi sekolah, saya lebih mudah dalam bersikap dengan macam-macam kondisi dan situasi serta perilaku sesama anggota organisasi yang pluralis. Saya juga dapat menyalurkan ide yang ada pada pikiran saya. Waktu yang saya gunakan juga tidak terbuang sia-sia setelah saya ikut dalam organisasi untuk menyalurkan kegiatan yang berguna. Harapan saya nantinya setelah hidup di tengah-tengah masyarakat, dapat mudah beradaptasi dengan segala kondisi dan situasi apapun. Pengalaman dalam organisasi di sekolah tidak akan dapat terulang dan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang sekalipun”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	152	92
2	Kurang mengetahui	12	7
3	Tidak mengetahui	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.1

Pemilu Legislatif 2009 ternyata sangat menarik untuk dicermati oleh para siswa, dari 165 responden yang mengetahui partai pemenang Pemilu Legislatif 2009 sebanyak 152 siswa atau 92 %, sedangkan yang kurang mengetahui sebanyak 12 siswa atau 7 % dan yang tidak mengetahui ada 1 siswa atau 1 %.

Untuk mengetahui partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2009 sangat mudah, baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga para siswa lebih tertarik untuk mengetahui partai mana saja yang selalu menghiasi media. Kalau dilihat dari tabel 4.20, yang kurang mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sama sekali partai pemenang Pemilu 2009 sangat kecil, ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang partai politik peserta Pemilu 2009 sudah sangat baik dan sudah bukan hal yang asing

Tabel 4.27

Mengetahui nama-nama partai peserta Pemilu Legislatif 2009

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	83	50
2	Kurang mengetahui	81	49
3	Tidak mengetahui	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.2

Berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tabel 4.20, karena yang mengetahui nama-nama partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 hanya 83 siswa atau 50 % dari 165 responden, hampir sama dengan yang kurang mengetahui yaitu sebesar 81 siswa atau 49 % dan yang tidak mengetahui 1 siswa atau 1 %.

Menurut peneliti hal ini sangat wajar jika yang kurang mengetahui dan yang tidak mengetahui sama dengan yang mengetahui. Para siswa hanya mengetahui nama-nama partai besar yang selalu menduduki rangking 1 – 5 dalam setaip pemilu, hal ini disebabkan karena kurangnya intensifnya sosialisasi politik sejak partai politik dinyatakan sebagai peserta pemilu sampai dengan berlangsungnya pemilu. Dengan segala keterbatasannya para pengajarpun berusaha mensosialisasikan munculnya, baik partai politik baru maupun lama yang menjadi peserta pemilu legislatif.

Tabel 4.28

Mengetahui partai pendukung calon
Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2009

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	116	70
2	Kurang mengetahui	48	29
3	Tidak mengetahui	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.3

Pengetahuan partai politik bagi para siswa terutama pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan wawasan yang lebih

dibandingkan dengan pemilu yang lain, hal ini dibuktikan bahwa 116 siswa atau 70 % mengetahui partai politik pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan yang kurang mengetahui 48 siswa atau 29 % dan yang tidak mengetahui ada 1 siswa atau 1 % saja.

Pemilihan Presiden 2009 merupakan hajat besar dari perwujudan pesta demokrasi. Hiruk pikuk dan menghangatnya politik menjelang Pilpres 2009 sangat mendominasi aktifitas politik dengan mencari format koalisi partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Barangkali yang membuat lebih menarik karena banyak Lembaga Survei yang juga memunculkan kajian-kajian tentang koalisi partai politik pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden maupun figur calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 4.29
Mengikuti berita perkembangan perolehan suara
Pemilu Legislatif 2009

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	46	28
2	Kadang-kadang	107	65
3	Tidak pernah	12	7

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.4

Berita perkembangan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2009 tidak banyak yang mengikuti, karena hanya 46 siswa atau 28 % yang sering mengikuti berita, yang paling banyak justru siswa yang kadang-kadang mengikuti berita sebanyak 107 siswa atau 65 % dan tidak pernah sama sekali mengikuti berita ada 12 siswa atau 7 %.

Tabel 4.30

Mengikuti berita perkembangan perolehan suara Pilpres 2009

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	135	82
2	Kadang-kadang	30	18
3	Tidak pernah	0	0
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.5

Sebagaimana peneliti uraikan pada tabel 4.22 tersebut di atas bahwa Pilpres 2009 sangat menarik bagi para siswa pada umumnya, baik partai politik pendukung maupun figur calon Presiden dan wakil Presiden. Bahkan pada pelaksanaan perhitungan suara, para siswa antusias sekali untuk mengikuti berita perkembangan perolehan suara dalam Pilpres 2009.

Sebanyak 165 responden yang menyatakan sering mengikuti berita perkembangan perolehan suara dalam Pilpres 2009 sebanyak 135 siswa atau 82 % baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sedangkan yang kadang-kadang saja mengikuti berita hanya 30 siswa atau 18 % dan bahkan yang tidak pernah mengikuti tidak ada. Ada daya tarik tersendiri bagi para siswa untuk mengikuti pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2009, sejak pembentukan koalisi partai pendukung sampai dengan pelaksanaan Pilpres 2009.

Tabel 4.31
Mengetahui fungsi MPR

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	116	70
2	Kurang mengetahui	48	29
3	Tidak mengetahui	1	1

	Jumlah	165	100
--	--------	-----	-----

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.6

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga politik paling banyak dikenal oleh para siswa menurut penelitian ini. Ada 116 siswa atau 70 % yang mengetahui tentang fungsi MPR, sedangkan yang kurang mengetahui fungsi lembaga tinggi negara tersebut sebanyak 48 siswa atau 29 %. Bahkan ada yang tidak tahu tentang fungsi lembaga politik tersebut yakni hanya 1 siswa atau 1 %.

Hal ini membuktikan bahwa simbol dan lembaga politik yang paling mudah dikenali oleh para siswa adalah MPR yang dulunya adalah sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan sekarang berubah menjadi Lembaga Tinggi Negara, setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali

Tabel 4.32
Mengetahui fungsi DPR

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	115	69
2	Kurang mengetahui	49	30
3	Tidak mengetahui	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.7

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga politik yang paling banyak dikenal oleh para siswa , karena lembaga tersebut ada di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota dan menurut penelitian ini, ada 115 siswa atau 69 % yang mengetahui tentang fungsi DPR, sedangkan yang kurang mengetahui fungsi lembaga tinggi negara tersebut sebanyak 49 siswa atau 30 %. Bahkan ada

yang tidak tahu tentang fungsi lembaga politik tersebut yakni hanya 1 siswa atau 1 %.

Jika dibandingkan dengan tabel 4.27 tentang pengetahuan fungsi MPR hampir sama, hanya selisih satu siswa saja baik yang mengetahui maupun yang kurang mengetahui dan yang tidak mengetahui sama yakni 1 siswa. Dewan Perwakilan Rakyat yang keberadaannya mewakili rakyat, memang lebih dikenal dan lebih memasyarakat disamping keberadaannya ada di tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah, juga kedudukan, peran dan fungsinya yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Tabel 4.33
Mengetahui fungsi DPD

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	85	52
2	Kurang mengetahui	76	46
3	Tidak mengetahui	4	2
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.8

Selain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih ada satu lagi yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) keberadaannya relatif masih baru dan belum memasyarakat atau belum begitu dikenal oleh para siswa.

Dari 165 responden ternyata hanya separoh lebih yaitu 85 siswa atau 52 % yang mengetahui fungsi DPD dan kurang mengetahui ada 76 siswa atau 46 % sedangkan yang tidak mengetahui ada 4 siswa atau 2 %. Hal ini membuktikan bahwa DPD memang belum banyak dikenal oleh para siswa,

karena fungsi dan perannya belum banyak diketahui oleh publik pada umumnya dan para siswa khususnya.

Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan dapat mengetahui, mempelajari bahkan mungkin mendiskusikan kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), agar lembaga ini lebih banyak dikenal oleh para siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tabel 4.34
Yang memilih dan mengangkat Menteri

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Presiden	140	85
2	MPR	23	14
3	DPR	2	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner C.9

Meskipun pengetahuan tentang kedudukan Presiden menjadi bagian dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, akan tetapi ada sebagian siswa yang tidak mengetahui bahwa para Menteri/Kabinet yang memilih dan mengangkat Presiden. Dalam penelitian ini yang mengetahui bahwa Menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden sebanyak 140 siswa atau 85 %, sedangkan yang menjawab bahwa menteri dipilih dan diangkat oleh MPR sebanyak 23 siswa atau 14 % dan yang menjawab bahwa menteri dipilih dan diangkat oleh DPR sebanyak 2 siswa atau 1 %.

d. Keperpihakan Politik

Tabel 4.35
Memiliki pilihan partai politik

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
----	---------	-----------	------------

			(%)
1	Ya	159	96
2	Tidak	6	4
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner D.1

Jika dilihat dari besarnya dorongan pemilih pemula atau setara dengan siswa yang sedang duduk di kelas XI untuk menorehkan pengalaman pertama kalinya menggunakan hak pilih sebagai warga negara, sangat menggembirakan karena dalam penelitian ini hanya 4% atau 6 siswa saja yang tidak memiliki pilihan partai politik.

Sebagian besar dari 165 responden, 159 siswa atau 96 % memiliki pilihan partai politik, jika pemilu diadakan saat ini. Pemilih pemula dalam kelompok ini juga dapat dikatakan sebagai pemilih sangat potensial, artinya dapat saja tidak memiliki pilihan jika partai politik kurang mendapat sosialisasi, akan tetapi akan menjadi sumbangan suara pemilih yang besar apabila mendapatkan pendidikan dan sosialisasi politik yang benar. Sosialisasi politik akan berdampak pada orientasi politik, tingkah laku dan sikap-sikap politik bagi para siswa yang pada akhirnya siswa dapat menentukan pilihan politiknya secara rasional.

Tabel 4.36
Alasan menggunakan hak pilih

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Inisiatif sendiri	153	93
2	Pengaruh keluarga	10	6
3	Pengaruh teman	2	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner D.2

Alasan dengan inisiatif sendiri menduduki peringkat pertama dalam menentukan pilihannya terhadap partai politik, dari 165 responden yang beralasan inisiatif sendiri sebanyak 153 siswa atau 93 %, sedangkan pengaruh keluarga ada 10 siswa atau 6 % dan pengaruh teman hanya 2 siswa atau 1 %.

Bedasarkan penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemilih pemula yang mendapatkan sosialisasi politik melalui sekolah sangat berpengaruh terhadap siswa dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian maka sosialisasi politik di sekolah dapat membentuk sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan politik.

Sosialisasi politik di sekolah dapat dikatakan proses secara langsung maupun tidak langsung, jika dikatakan langsung karena melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sedangkan dikatakan tidak langsung karena siswa dapat magang menjadi organisasi yang ada di sekolah.

Tabel 4.37
Partai pilihan responden

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Partai Demokrat (PD)	123	75
2	Partai Golkar (PG)	10	6
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6	4
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	5
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	1
6	Lainnya	15	9
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner D.3

Partai Demokrat merupakan pilihan siswa yang paling banyak diantara partai yang lain. Sebanyak 123 siswa atau 75 % memilih Partai Demokrat (PD), sedangkan sisanya sebanyak 10 siswa atau 6 % memilih Partai Golkar (PG) dan 6 siswa atau 4 % memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berazaskan Islam yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata juga menjadi pilihan siswa walau hanya 9 siswa atau 5 % yang memilih, masih lebih baik dibanding Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu 2 siswa atau 1 % yang memilih.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas juga menunjukkan bahwa ada 15 siswa atau 9 % yang memilih partai lain dengan pilihannya sendiri (inisiatif sendiri) yakni 8 siswa memilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 2 siswa memilih Partai Damai Sejahtera (PDS), 1 siswa memilih Partai Republika, 1 siswa memilih Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan 3 siswa tidak memilih. Dengan demikian maka kalau kita prosentasekan, yang memilih sebanyak 162 siswa atau 98 %, sedangkan yang tidak memilih (golput) sebanyak 3 siswa atau 2 %

e. Nilai-nilai Demokrasi

Tabel 4.38
Kemampuan dalam menjaga nilai persamaan

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	109	66
2	Kadang-kadang	55	33
3	Tidak pernah	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.1

Penerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari hanya ada 1 siswa yang tidak mampu menjaga nilai persamaan, sedangkan yang kadang-kadang mampu sebanyak 55 siswa atau 33 % dan yang mampu menjaga nilai persamaan sebanyak 109 siswa atau 66 %.

Dalam teori dan praktik politik demokrasi, masalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana dapat mencapai tingkat persamaan yang lebih besar dalam masyarakat, persamaan yang dimaksud adalah perwujudan kehidupan didalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan yang beradab serta kehidupan sosial budaya yang terbelakang akan menyebabkan hilangnya makna persamaan dan lebih menjadi diskriminasi.

Tabel 4.39
Kemampuan dalam menghargai nilai perbedaan

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	135	82
2	Kadang-kadang	30	18
3	Tidak pernah	0	0
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.2

Kemampuan untuk menghargai nilai perbedaan sangat dibutuhkan kemampuan pribadi yang tangguh, tanggap, tanggon dan kesabaran. Jika dilihat tabel tersebut di atas dari hasil penelitian sangat menggembirakan karena yang menjawab sering atau mampu menghargai nilai perbedaan sebanyak 135 siswa

atau 82 % dari 165 responden, sedangkan yang kadang-kadang mampu 30 siswa atau 18 % dan yang menjawab tidak pernah tidak ada.

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan suku, agama, keturunan, golongan dan budaya yang pada umumnya perbedaan ini dapat menimbulkan konflik, lebih-lebih siswa yang tergabung dalam kelompok kawula muda yang biasanya mengedepankan akal dari pada perasaan.

Dengan demikian jika dilihat dari tabel 4.33 maka dalam kehidupan siswa sudah terbiasa dalam perbedaan bahkan dalam kehidupan sehari-hari siswa mampu berdampingan dan bekerja sama secara damai dalam suatu perbedaan dan menjauhkan sifat yang memaksakan kehendak.

Tabel 4.40
Kemampuan dalam menerapkan nilai toleransi

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	117	71
2	Kadang-kadang	48	29
3	Tidak pernah	0	0
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.3

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang ber Bhineka Tunggal Ika sangat dibutuhkan sikap toleransi, lebih-lebih terhadap siswa yang sedang dalam proses pematangan kepribadian dalam demokrastiasasi. Dalam penelitian menunjukkan bahwa 117 siswa atau 71 %, siswa mampu menerapkan nilai toleransi, sedangkan yang kadang-kadang sebanyak 48 siswa atau 29 % dari 165 responden dan yang tidak pernah atau tidak mampu tidak ada.

Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh siswa lain. Sikap toleransi memungkinkan adanya kesadaran masing-masing siswa untuk menghargai dan menghormati pendapat dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang lain yang berbeda

Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap sabar membiarkan sesuatu, menahan diri dan berlapang dada atas perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Toleransi antar umat beragama berarti sikap sabar membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain mengenai agama dan kepercayaannya.

Toleransi merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tatacara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok siswa yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.

Tabel 4.41
Kemampuan dalam menjaga nilai kebebasan

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	120	73
2	Kadang-kadang	45	27
3	Tidak pernah	0	0
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.4

Kebebasan merupakan nilai demokrasi yang harus dimiliki oleh seorang siswa termasuk bagaimana caranya menjaga kebebasan itu dan melakukan kegiatan secara merdeka dan bertanggung jawab dan tidak menghalangi kebebasan siswa yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 120 siswa atau 73 % dari 165 responden, sering atau mampu menjaga nilai kebebasan, sedangkan sisanya 45 siswa atau 27 % hanya kadang-kadang bisa menjaga nilai kebebasan. Kedewasaan berpikir dan bertindak serta tanggung jawab adalah cermin siswa dalam menjaga nilai kebebasan.

Siswa berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan karya dan siswa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan siswa lain untuk melakukan hal yang sama. Kebebasan bersikap kritis termasuk nilai yang harus dijaga, karena pada hakekatnya kritis adalah peka terhadap situasi, tajam dalam mengevaluasi dan tepat dalam mengantisipasi.

Tabel 4.42
Kemampuan dalam mengembangkan nilai solidaritas

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	133	80,6
2	Kadang-kadang	31	18,8
3	Tidak pernah	1	0,6
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.5

Solidartas merupakan perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh ke dalam perpecahan akibat terlalu mengutamakan kebebasan pribadi tanpa mengingat adanya persamaan hak maupun semangat kebersamaan.

Penelitian menunjukkan bahwa 133 siswa atau 80,6 % siswa mampu mengembangkan nilai solidaritas, sedangkan 31 siswa atau 18,8 % kadang-kdang mampu mengembangkan nilai soiladaritas dan hanya 1 siswa atau 0,6 % tidak

pernah atau tidak bisa mengembangkan nilai soildarutas. Kebersamaan yang dikembangkan oleh siswa sangat menggembirakan jika dilihat dari hasil penelitian artinya kebersamaan atau setia kawan sangat dijunjug tinggi untuk menghindari ketidakpedulian terhadap siswa lain dan untuk menjauhkan dari sifat egoismen yang berlebihan.

Tabel 4.43
Bergaul dengan teman yang memiliki pandangan politik/kalangan yang berbeda

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	120	73
2	Kadang-kadang	42	25
3	Tidak pernah	3	2
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.6

Pandangan politik yang berbeda atau kalangan yang berbeda tidak menghalangi siswa dalam bergaul, kenyatannya bahwa 120 siswa atau 73 % dari 165 responden dapat bergaul atau sering bergaul dengan teman yang memiliki pandangan atau kalangan yang berbeda dan yang kadang-kadang bergaul dengan teman yang memiliki pandangan politik atau kalangan yang berbeda sejumlah 42 siswa atau 25 % dan yang tidak pernah atau tidak dapat bergaul dengan teman yang berbeda pandangan hanya 3 siswa atau 2 %.

Dalam pergaulan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah ternyata sebagian besar atau sebanyak 120 siswa bisa bergaul dengan teman yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Sedangkan yang 42 siswa kadang-kadang bisa bergaul, artinya dalam bergaul kadang masih memilih-milih

teman yang sependangan dan yang tidak bisa bergaul dengan teman yang berbeda kalangan sebanyak 3 siswa.

Tabel 4.44
Bekerjasama dengan teman yang memiliki pandangan politik/kalangan yang berbeda

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	125	76
2	Kadang-kadang	36	22
3	Tidak pernah	4	2
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.7

Nilai kerjasama sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan diri siswa maupun dalam berorganisasi. Dari 165 responden, 125 siswa atau 76 % sering bekerjasama atau tidak keberatan untuk bekerjasama dengan teman yang memiliki pandangan politik atau kalangan yang berbdeda, sedangkan 36 siswa atau 22 % kadang-kadang keberatan dan 4 siswa atau 2 % tidak pernah atau keberatan jika bekerja sama dengan teman yang memiliki pandangan politik yang berbeda atau kalangan yang berbeda.

Sejauh pengamatan peneliti, bahwa siswa sangat baik dalam bekerjasama baik dalam pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun melalui kegiatan organisasi-organisasi yang berada di bawah kendali Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Bukti dapat kerjasama tersebut sering diwujudkan dalam bentuk sarasehan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mandiri yang dipercayakan kepada para siswa.

Tabel 4.45
Bekerjasama dengan baik bersama teman yang berbeda ras, suku, agama dan budaya

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	136	82
2	Kadang-kadang	22	13
3	Tidak pernah	7	5
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner E.8 yang di olah

Sebagai wujud tidak keberatan dalam menjalin kerjasama pada tabel 4.37 maka pada tabel 4.38 membuktikan bahwa 136 siswa atau 82 % dari 165 responden sering atau pernah kerjasama dengan teman yang berbeda ras, suku, agama dan budaya, sedangkan yang kadang-kadang /pernah sebanyak 22 siswa atau 13 % dan yang tidak pernah bekerjasama dengan teman yang berbeda ras, suku, agama dan budaya sebanyak 7 siswa atau 5 %.

Keberagaman atau pluralisme tidak menghalangi siswa untuk bekerjasama, hal ini sering diwujudkan dalam kegiatan siswa yang kepanitiannya menggambarkan pluralisme sehingga menjadikan perekat dan menambah kekuatan baru dalam merealisasikan keinginannya.

f. Kepercayaan Politik

Tabel 4.46
Pemenuhan janji para politisi dalam kampanye

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	57	35
2	Kadang-kadang	106	64
3	Tidak pernah	2	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner F.1

Para siswa ternyata sudah bisa menilai bahwa para politisi yang sering memberikan janji dalam kampanye tidak banyak yang memenuhi janji mereka. Dari 165 responden, yang berpendapat bahwa para politisi sering memenuhi janji kampanye sebanyak 57 siswa atau 35 %, sedangkan yang berpendapat bahwa para politisi hanya kadang-kadang memenuhi janji kampanye sebanyak 106 siswa atau 64 % dan 2 siswa atau 1 % berpendapat bahwa para politisi tidak pernah memenuhi janji mereka dalam kampanye.

Dengan demikian maka berdasarkan penelitian tersebut di atas bahwa yang berpendapat kadang-kadang menduduki peringkat pertama, artinya bahwa siswa sudah dapat menilai bagaimana para politisi hanya kadang-kadang memenuhi janji ketika kampanye.² Kepercayaan politik terhadap para politisi ternyata sangat rendah akibat para politisi tersebut hanya kadang-kadang memenuhi janji atau bahkan tidak pernah memenuhi janji mereka.

Tabel 4.47
Para politisi sering mengumbar janji agar namanya
terpilih dalam Pemilu

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	140	85
2	Kadang-kadang	24	14
3	Tidak pernah	1	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner F.2

² Hasil wawancara dengan Dimas CB Klas XI.IA6 “ Para politisi hanya pandai dan senang mengumbar janji. Mungkin ada sebagian yang memang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, akan tetapi sebagian besar malah menyalahgunakan jabatan-jabatan wakil rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri “

Menurut pendapat para siswa, bahwa para politisi itu hanya bisa mengumbar janji agar namanya terpilih dalam Pemilu. Dari 165 responden yang menyatakan bahwa para politisi yang sering atau hanya pandai mengumbar janji sebanyak 140 siswa atau 85 % sedangkan yang menyatakan kadang-kadang mengumbar janji sebanyak 24 siswa atau 14 % dan 1 siswa atau 1 % menyatakan bahwa para politisi tidak pernah mengumbar janji agar namanya terpilih dalam Pemilu.³

Mengumbar janji dalam kampanye barangkali sudah tidak asing lagi bagi para politisi agar namanya terpilih sebagai anggota Legislatif. Dalam penelitian tersebut di atas membuktikan bahwa 140 siswa dari 165 responden menyatakan bahwa para politisi hanya senang mengumbar janji agar namanya terpilih dalam Pemilu. Ternyata siswapun menilai bahwa rakyat tidak butuh hanya janji tapi lebih penting bukti, karena mereka para politisi setelah menjadi anggota Legislatif sudah lupa dengan janjinya dan lebih mementingkan diri dan kelompoknya.

Tabel 4.48
Pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat
hanya untuk kepentingan pribadi para politisi

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	89	54
2	Kadang-kadang	71	43
3	Tidak pernah	5	3

³ “ Karena sudah banyak bukti bahwa para politisi hanya mengumbar janji saat kampanye, lama kelamaan hal tersebut bisa membentuk opini masyarakat akan kebohongan para politisi. Selain itu, janji para politisi terkadang hanya berpihak pada golongan atas, sedangkan golongan bawah biasanya hanya bisa mendapatkan janji-jani dari para politisi. Mungkin benar sekali, janji para politisi saat kampanye hanya untk mendapatkan kemenangan dan keuntungan tersendiri”

	Jumlah	165	100
--	--------	-----	-----

Sumber : Diolah dari Kuesioner F.3

Uang rakyat yang seharusnya dialokasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, ternyata hanya untuk kepentingan pribadi para politisi yang dilegalkan oleh Pemerintah dengan berbagai regulasi sebagai payung hukumnya. Sebanyak 89 siswa atau 54 % dari 165 responden berpendapat bahwa sering pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk kepentingan pribadi para politisi, sedangkan yang berpendapat kadang-kadang Pemerintah menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan pribadi para politisi sebanyak 71 siswa atau 43 % dan 5 siswa atau 3 % menyatakan bawa Pemerintah tidak pernah mengahambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi para politisi.

Siswa berpendapat bahwa Pemerintah dengan berbagai dalih membuat regulasi atas usulan Legislatif untuk menaikkan gaji dan berbagai tunjangan untuk kepentingan pribadi para politisi. Kenyataan ini sebenarnya terjadi dari para politisi dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi sampai tingkat Pusat, yang tidak menceerminkan aspirasi dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang telah memilih mereka sehingga dapat duduk di kursi Legislatif. Kebiasaan mengumbar janji para politisi sudah sangat membudaya ketika berkampanye untk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, akan tetapi setelah terpilih mereka lupa dengan janjinya dan memburu kepentingan pribadi.

Tabel 4.49
Peran para politisi memperjuangkan aspirasi rakyat

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
----	---------	-----------	---------------------

1	Sering	19	12
2	Kadang-kadang	139	84
3	Tidak pernah	7	4
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner F.4

Disamping para politisi tidak memenuhi janji mereka dalam kampanye setelah menjadi anggota legislatif, para politisi juga tidak sepenuhnya memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, 19 siswa atau 12 % menyatakan sering para politisi memperjuangkan rakyat, tetapi yang berpendapat kadang-kadang memperjuangkan aspirasi rakyat sebanyak 139 siswa atau 84 % dan 7 siswa atau 4 % menyatakan tidak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sebagian besar responden atau 139 siswa atau 84 % dari 165 responden berpendapat bahwa para politisi kadang-kadang memperjuangkan aspirasi rakyat, artinya bahwa para politisi tidak sepenuhnya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tabel 4.50

Peran para politisi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	30	18
2	Kadang-kadang	127	77
3	Tidak pernah	8	5
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner F.5

Penelitian menunjukkan bahwa para politisi hanya kadang-kadang telah berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 30 siswa atau 18 % dari 165 responden menyatakan para politisi sering berbuat banyak

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan 127 siswa atau 77 % berpendapat bahwa para politisi hanya kadang-kadang berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 8 siswa atau 5 % menyatakan bahwa para politisi tidak pernah berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut hasil penelitian tersebut di atas, bahwa sebagian besar responden atau 127 siswa dari 165 siswa menyatakan para politisi hanya kadang-kadang berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian maka kesejahteraan rakyat yang diharapkan dari peran para politisi tidak banyak yang dapat diharapkan.

Tabel 4.51
Usaha Pemerintah dalam memberantas Korupsi

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	140	85
2	Kadang-kadang	23	14
3	Tidak pernah	2	1
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner F.6

Kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi pada program pemberantasan korupsi, terutama dalam menggunakan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan institusi penegak hukum yang khusus menangani korupsi. Sebanyak 140 siswa atau 85 % dari 165 responden menyatakan bahwa pemerintah sering atau selalu berusaha keras untuk menghilangkan korupsi dan menggunakan sumber daya yang ada. Sedangkan 23 siswa atau 14 % menyatakan bahwa Pemerintah hanya kadang-kadang atau tidak serius menghilangkan

korupsi dan 2 siswa atau 1 % berpendapat bahwa Pemerintah tidak pernah serius menghilangkan korupsi dan tidak memberdayakan sumber daya yang ada.⁴

Wajar apabila sebagian besar para siswa berpendapat bahwa Pemerintah berusaha keras untuk menghilangkan korupsi dan menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Pemberantasan korupsi masuk dalam program seratus hari Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono termasuk didalamnya pemberantasan mafia peradilan, penindakan terhadap aparat penegak hukum dan reformasi birokrasi pada institusi penegak hukum. Kepercayaan para siswa terhadap pemerintah akan semakin baik manakala pemerintah semakin menunjukkan keberhasilannya dalam menegakkan hukum secara proposional dan profesional.

g. Keterlibatan Politik

Tabel 4.52
Kegiatan organisasi di sekolah maupun di luar sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Ya	155	94
2	Tidak	10	6
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner G.1

Kegiatan organisasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah ternyata sangat diminati oleh para siswa sebagai tempat magang. Sebanyak 155 siswa atau 94 % dari 165 responden menyatakan pernah ikut dalam organisasi di

⁴ Hasil wawancara dengan Intan Izal Islami Klas XI.IA6 “ Baik atau tidaknya suatu hasil, itu tidak begitu penting. Yang lebih penting yaitu seberapa besar usaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Saya sebagai anak bangsa memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, karena saya dapat melihat, memandang dan merasakan seberapa besar usaha pemerintah untuk mencapai hasil yang terbaik “

sekolah maupun di luar sekolah, sedangkan 10 siswa atau 6 % menyatakan tidak ikut dalam organisasi di sekolah maupun di luar sekolah.

Keikutsertaan siswa dalam organisasi di sekolah adalah termasuk sosialisasi politik tidak langsung atau dapat disebut magang. Magang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar pada tempat-tempat tertentu termasuk di sekolah sebagai tempat latihan kegiatan organisasi non politik. Menjadi anggota organisasi siswa merupakan pilihan siswa sendiri bukan karena kehendak sekolah maupun pengajar sebagai bagian dari wahana berlatih dan sebagai pengembangan diri siswa untuk mengisi waktu luang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Tabel 4.53
Mengikuti rapat-rapat organisasi baik di sekolah
maupun di luar sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	99	60
2	Kadang-kadang	55	33
3	Tidak pernah	11	7
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner G.2

Sebanyak 99 siswa atau 60 % dari 165 responden menyatakan sering mengikuti rapat-rapat organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, sedangkan yang kadang-kadang mengikuti sebanyak 55 siswa atau 33 % dan 11 siswa atau 7 % tidak pernah mengikuti rapat-rapat organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Magang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar. Magang di tempat-tempat tertentu atau orientasi non-politik, nantinya akan mempengaruhi seseorang ketika berhubungan dengan politik. Contohnya, siswa ikut organisasi

OSIS, MPK, Rohis dan Paskibra dan lain sebagainya. Dalam organisasi tersebut mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, debat dan membuat keputusan, kegiatan ini akan sangat membantu manakala siswa nanti benar-benar menekuni dan bahkan berprofesi ke dalam dunia politik praktis.

Tabel 4.54
Aktifitas sosial di lingkungan RT dan RW

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sering	55	33
2	Kadang-kadang	90	55
3	Tidak pernah	20	12
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner G.3

Aktifitas sosial di lingkungan RT dan RW ternyata tidak banyak yang diminati oleh para siswa. Pada penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa yang sering terlibat hanya 55 siswa atau 33 %, sedangkan yang kadang-kadang terlibat aktifitas soaial di lingkungan RT dan RW sebanyak 90 siswa atau 55 % dan 20 siswa atau 12 % tidak pernah terlibat dalam aktifitas sosial di lingkungan RT dan RW.

Tabel 4.55
Menjadi anggota ekstrakurikuler di sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Ya	134	81
2	Tidak	31	19
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner G.4

Organiasai ekstrakurikuler di sekolah banyak ragamnya, sehingga memungkinkan bagi para siswa untuk memilih menjadi anggota sesuai dengan

bakat dan minat sebagai upaya dalam pengembangan diri dan membentuk kepribadian siswa.

Dari 165 responden yang menyatakan menjadi anggota organisasi ekstrakurikuler sebanyak 134 siswa atau 81 %, sedangkan yang tidak menjadi anggota organisasi ekstrakurikuler sebanyak 31 siswa atau 19 %. Kebebasan berekspresi dapat diwujudkan melalui organisasi ekstrakurikuler, karena siswa diberikan kepercayaan oleh pembina ekstra untuk merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Disinilah para siswa mendapatkan pengalaman berharga dalam mengelola organisasi yang setiap tahun organisasi tersebut mengalami reorganisasi.

Tabel 4.56
Menjadi anggota organisasi sosial di luar sekolah

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Ya	93	56
2	Tidak	72	44
	Jumlah	165	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner G.5

Organisasi sosial di luar sekolah juga banyak diminati oleh para siswa, sebanyak 93 siswa atau 56 % dari 165 responden menyatakan menjadi anggota dan 72 siswa atau 44 % tidak menjadi anggota organisasi sosial di luar sekolah. Keterlibatan politik siswa dengan menjadi anggota organisasi sosial di luar sekolah juga sangat baik, artinya menimba pengalaman dan belajar berorganisasi sebagai tempat magang banyak memberi wawasan dan warna dalam kehidupan

bermasyarakat dan tentu menjadi bekal kelak setelah berkecimpung pada organisasi politik.

Siswa yang memiliki sikap kritis dan peka terhadap kehidupan organisasi akan selalu membuahkan ide dan gagasan guna melakukan kegiatan pada organisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan akan berdampak positif pada suatu ketika memimpin sebuah organisasi.

4.2.3 Proses sosialisasi politik di SMA Negeri 2 Semarang

Proses sosialisasi politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang yang diawali dari masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga. Sikap-sikap dan perilaku yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat dengan dengan tingkah laku yang dianut dalam lingkungan keluarga, sementara ia menjalani pergaulan diluar keluarga dan memperoleh berbagai pengalaman sosial.

Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang dalam lingkungan keluarga sangat kuat dan kekal. Sangat jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang dan kekuasaan yang ada di lingkungan keluarga. Simbol wewenang dan kekuasaan tergambarakan dalam lingkungan keluarga berupa kekuasaan mengatur, kekuasaan memerintah dan kekuasaan memberi sanksi terhadap anggota keluarga yang tidak mematuhi.

Keluarga pada umumnya membuat keputusan bersama, dan bagi anggota keluarga terutama anak usia remaja, keputusan-keputusan yang di buat itu bisa otoritatif artinya, keengganan untuk mematuhi dapat berakibat menerima sanksi. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Peranan sekolah adalah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik, mengajar, memperbaiki serta memperhalus tingkah laku dan sikap anak didik yang telah dibentuk melalui proses pendidikan dari keluarganya. Sementara dalam perkembangan kepribadian anak didik, sekolah memiliki peranan penting dengan melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang disusun dan dikembangkan berdasarkan karakteristik sekolah, maka sekolah memiliki fungsi terhadap anak didik antara lain yaitu;

- a. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik dan antara anak didik dengan warga sekolah lainnya atau orang yang bukan guru (karyawan).
- b. Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah dan
- c. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan-pendidikan khusus yang tidak diperoleh dalam keluarga. Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak mengenai pentingnya

hidup bernegara, rasa cinta tanah air dan rasa setia kepada Negara, juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana anak diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah dan di kenalkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Sosialisai politik melalui sekolah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agen sosialisasi politik lainnya. Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat menerima sosialisasi politik secara langsung, karena kompetensi dasar mata pelajaran yang diajarkan tersebut memuat kompetensi dasar untuk membentuk sikap, kepribadian dan pola-pola tingkah laku dan orientasinya menjadi warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam proses sosialisasi politik peserta didik, walaupun sekolah hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam perilaku politiknya setelah mengenyam pendidikan melalui sekolah dan melakukan komunikasi, interaksi terhadap lingkungan warga sekolah yang memungkinkan menambah pengalaman siswa dalam menghadapi masalah pribadinya, masalah pengembangan dirinya dan adaptasi serta peran-peran yang ditampilkan dalam lingkungannya.

Sekolah mempunyai peranan yang penting dan fundamental di dalam proses sosialisasi politik pada peserta didik, yaitu proses membantu

perkembangan individu menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik didalam masyarakat, menjadi warga negara yang baik serta mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebab bagaimanapun pada akhirnya para peserta didik akan menjalani hidup, mengabdikan dan berkarya dan berada di tengah-tengah masyarakat.

Sekolah sebagai agen perubahan sosialisasi politik, memegang peranan yang sangat penting. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spriritual dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan.

Berdasarkan teori sosialisasi politik, bahwa sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi politik. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “ saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peranan penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “ aturan permainan politik ” (*rule of political game*) yang tidak tertulis.

Berdasarkan teori proses sosialisasi politik tersebut di atas, maka sekolah merupakan tipe proses sosialisasi politik langsung. Sosialisasi politik langsung diwujudkan dalam pendidikan politik melalui Mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah lanjutan adalah sebuah contoh dari sosialisasi politik langsung (Mohtar mas'oed, 1995:34).

Sosialisasi politik langsung melalui pendidikan politik adalah upaya yang secara sadar dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan, dan memberikan pelajaran kepada anak untuk memiliki orientasi politik tertentu. Pendidikan politik bisa dilakukan di Sekolah, organisasi, partai politik, media massa, diskusi politik, serta forum-forum politik.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut di atas, maka proses sosialisasi politik yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang memiliki peranan penting, karena memiliki peran ganda yaitu disamping proses sosialisasi politik secara langsung juga sekaligus sebagai tipe proses sosialisasi politik secara tidak langsung. Melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan merupakan proses sosialisasi politik secara langsung.

Kegiatan pembelajaran sosialisasi politik meliputi, menggali informasi tentang makna kesadaran politik, mendiskusikan tentang fungsi dan peranan partai politik, mendiskusikan tentang mekanisme sosialisasi budaya politik, mendiskusikan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya politik yang sesuai dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia, mensimulasikan budaya politik partisipan di lingkungan sekolah, mendemonstrasikan budaya politik partisipan di depan kelas dan mendemostrasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerahnya

Keterlibatan fisik dan emosi siswa dalam pembelajaran di sekolah sangat bermakna untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Disamping memberikan pengetahuan tentang dunia politik dan lembaga-lembaga politik serta hubungannya, simbol-simbol negara dan memberikan pandangan

yang lebih kongkrit tentang atribut politik. Keterlibatan siswa dalam mengungkapkan isu-isu politik yang sedang berkembang dalam masyarakat dan kemudian melakukan diskusi bahkan debat politik merupakan wujud pengembangan diri siswa untuk mengorganisasikan diri dan kelompoknya.

Upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman konsep terhadap siswa mutlak diperlukan sebagai konsekuensi amanat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikembangkan oleh SMA Negeri 2 Semarang. Strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan ide, gagasan serta kreativitasnya sedangkan tugas guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran praktik kewarganegaraan.

Debat politik dengan tema-tema politik dan berlatih membuat organisasi partai politik ala SMA Negeri 2 Semarang sebagai salah satu contohnya, menurut peneliti dengan model ini dapat menumbuhkan sikap dan orientasi politik dalam proses sosialisasi politik. Inovasi dan kreativitas siswa dalam hal ini sangat dituntut untuk dapat bersaing, bersanding bahkan bertanding dengan kelompok organisasi politik lainnya. Presentasi partai politik ala siswa SMA Negeri 2 Semarang, menjadi ajang adu kreativitas dan gengsi dalam memaparkan ide dan berargumentasi visi dan misi serta program-program partai politik.

Proses sosialisasi politik secara tidak langsung yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang juga memiliki peranan yang sangat penting kaitannya dalam pembentukan karakter siswa agar menjadi warga negara yang cerdas secara intelektual, menjadi generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spriritual

serta memiliki ketrampilan kewarganegaraan. Magang menjadi salah satu anggota organisasi yang ada di sekolah merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar.

Magang atau ketrlibatan siswa pada organisasi yang berada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, ADISMA, SDP, PRAMUKA, PMR dan PASKIBRA dan TEATER SADEWA yang aktivitasnya pada orientasi non-politik. Diharapkan bahwa dengan magang atau belajar di organisasi di sekolah, dikemudian hari nantinya akan dapat mempengaruhi dirinya ketika berhubungan dengan politik secara langsung. Siswa yang ikut organisasi kesiswaan, dalam organisasi tersebut mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, berdebat, adu argumen dan membuat keputusan. Kegiatan ini akan sangat membantu manakala siswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik praktis.

Hasil yang diperoleh melalui proses sosialisasi politik yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang, baik melalui proses sosialisasi politik langsung maupun proses sosialisasi politik tidak langsung dapat memberikan pemahaman dan pengalaman serta membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, analitis dan partisipatif. Kepercayaan siswa terhadap kinerja para politisi baik sejak mencalonkan diri maupun sudah menjadi anggota legislatif sangat rendah, akan tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi ini membuktikan bahwa melalui proses sosialisasi politik yang baik siswa dapat menganalisis dan mengkritisi perilaku para politisi dan kinerja pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan responden tentang rendahnya kepercayaan terhadap para politisi, baik ketika kampanye maupun sudah menjadi anggota legislatif.

Dampak positif dari hasil proses sosialisasi politik juga ditunjukkan oleh siswa pada keperpindahan politik, 96 % siswa sudah memiliki pilihan partai politik dan sisanya tidak memiliki pilihan. Alasan pilihan atas inisiatif sendiri sangat tinggi 93 % dan sisanya pengaruh keluarga dan teman, sedangkan partisipasi politik yang ditunjukkan pada pilihan partai politik sangat baik dengan pilihan partai yang bervariasi dan tidak ada yang tidak memiliki pilihan partai politik

4.2.4 Sikap demokratis hasil sosialisasi politik

Berdasarkan hasil penelitian, sikap demokratis yang ditunjukkan oleh siswa hasil dari proses sosialisasi politik sangat baik untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang adaptif, kreatif dan kritis dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sikap demokratis yang diharapkan agar siswa mampu menjaga nilai persamaan, mampu menghargai nilai perbedaan, mampu menerapkan nilai toleransi, mampu menjaga nilai kebebasan, mampu mengembangkan nilai solidaritas, bisa bergaul dan bekerjasama dengan teman yang memiliki pandangan politik/kalangan yang berbeda.

- 1) Nilai persamaan dapat ditunjukkan bagaimana mencapai tingkat persamaan yang lebih besar dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Persamaan yang dimaksud adalah perwujudan kehidupan di dalam lingkungan sekolah yang saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan yang beradab serta kehidupan sosial budaya yang terbelakang akan menyebabkan hilangnya makna persamaan dan lebih menjadi diskriminasi.

- 2) Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan suku, agama, keturunan, golongan dan budaya yang pada umumnya perbedaan ini dapat menimbulkan konflik, lebih-lebih siswa yang tergabung dalam kelompok kawula muda yang biasanya mengedepankan akal dari pada perasaan. Dalam kehidupan siswa sudah terbiasa dalam perbedaan bahkan dalam kehidupan sehari-hari siswa mampu berdampingan dan bekerja sama secara damai dalam suatu perbedaan dan menjauhkan sifat yang memaksakan kehendak.
- 3) Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap sabar membiarkan sesuatu, menahan diri dan berlapang dada atas perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Toleransi antar umat beragama berarti sikap sabar membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain mengenai agama dan kepercayaannya. Toleransi merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tatacara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok siswa yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.
- 4) Kedewasaan berpikir dan bertindak serta tanggung jawab adalah cermin siswa dalam menjaga nilai kebebasan. Siswa berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan karya dan siswa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan siswa lain untuk melakukan hal yang sama. Kebebasan bersikap kritis termasuk nilai yang harus dijaga, karena pada hakekatnya kritis adalah peka terhadap situasi, tajam dalam mengevaluasi dan tepat dalam mengantisipasi

- 5) Solidaritas merupakan perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh ke dalam perpecahan akibat terlalu mengutamakan kebebasan pribadi tanpa mengingat adanya persamaan hak maupun semangat kebersamaan. Kebersamaan yang dibangun oleh siswa sangat positif jika dilihat dari hasil penelitian artinya kebersamaan atau setia kawan sangat dijunjung tinggi untuk menghindari ketidakpedulian terhadap siswa lain dan untuk menjauhkan dari sifat egois yang berlebihan
- 6) Sejauh pengamatan peneliti, bahwa siswa sangat baik dalam bekerjasama baik dalam pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun melalui kegiatan organisasi-organisasi yang berada di bawah kendali Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Bukti dapat kerjasama tersebut sering diwujudkan dalam bentuk sarasehan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mandiri yang dipercayakan kepada para siswa. Keberagaman atau pluralisme tidak menghalangi siswa untuk bergaul bahkan bekerjasama, hal ini sering diwujudkan dalam kegiatan siswa yang kepanitiannya menggambarkan pluralisme sehingga menjadikan perekat dan menambah kekuatan baru dalam merealisasikan keinginannya.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Simpulan

Sosialisasi politik merupakan suatu cara dalam mengembangkan dan menginformasikan politik, maka fungsi yang paling mendasar dari sosialisasi politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahami secara benar tentang apa yang ada dalam politik. Dengan adanya informasi yang benar maka kelak dikemudian hari akan tercipta suatu masyarakat yang anggota-anggotanya memiliki pengetahuan politik yang baik dan diharapkan dengan mempunyai pengetahuan tersebut mereka dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan politik dan peduli terhadap kondisi politik negaranya.

Sekolah merupakan tempat pendidikan dan bagian dari proses sosialisasi politik secara langsung, jadi tidak mengherankan jika sekolah dapat memberikan pandangan-pandangan kongkret tentang segala hal tentang politik, karena sekolah memberikan pengetahuan kepada generasi muda yang juga sebagai pemilih pemula tentang dunia politik. Sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada generasi muda mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta terhadap tanah air melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai bagian dari pendidikan politik bangsa, sekolah tidak lagi dipandang sebelah mata dalam proses sosialisasi politik. Peran sekolah semakin penting seiring dengan pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 yang dirancang dan dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain Ilmu Politik, Ilmu Negara, Hukum, Moral dan Filsafat. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang memungkinkan mengembangkan kepribadian secara individual dan sosial melalui proses sosialisasi politik.

Proses sosialisasi politik yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang selain melalui proses sosialisasi politik secara langsung juga melalui proses sosialisasi politik secara tidak langsung. Proses sosialisasi politik secara langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik untuk lebih tertarik dan mencintai segala hal yang berkaitan dengan dunia politik melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan harus aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat memberikan kesempatan dan keterlibatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengekspresikan ide, gagasan dan kreatifitasnya melalui diskusi, presentasi, debat dan inquiri tentang kajian-kajian politik.

Hasil yang diperoleh melalui proses sosialisasi politik langsung berupa pengetahuan politik. Dengan pengetahuan tersebut siswa menjadi lebih kritis dan analitis terhadap perkembangan politik yang sedang berkembang baik terhadap kinerja politisi maupun terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sebagian besar responden menaruh kepercayaan terhadap para politisi sangat rendah, baik saat kampanye sebagai calon legislatif maupun saat menjadi anggota legislatif yaitu pemenuhan janji kampanye 35 %, mengumbar janji 85 %, memperjuangkan aspirasi rakyat 12 % dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 18 %. Sedangkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi dalam usaha memberantas korupsi dan menggunakan sumber daya yang ada 85 % .

Keterlibatan politik dalam hal ini menjadi anggota organisasi di sekolah cukup tinggi yaitu menjadi organisasi di sekolah dan luar sekolah 94 %, mengikuti rapat-rapat organisasi sekolah dan luar sekolah 60 % dan menjadi anggota ekstrakurikuler di sekolah 81 %. Sedang partisipasi politik yang ditunjukkan juga cukup tinggi yakni yang memiliki pilihan partai politik 96 %, alasan menggunakan hak pilih (inisiatif sendiri 93 %, pengaruh keluarga 6 % dan pengaruh teman 1 %), partai pilihan responden (Partai Demokrat 75 %, Partai Golkar 6 %, PDIP 4 %, PKS 5 % PAN 1 % dan lainnya 9 %).

Nilai-nilai demokratis yang diperoleh dari hasil proses sosialisasi politik juga sangat baik yaitu kemampuan dalam menjaga nilai persamaan sebanyak 66 %, kemampuan dalam mengargai nilai perbedaan 82 %, kemampuan menerapkan nilai toleransi 71 %, kemampuan dalam menjaga nilai kebebasan 73 %, kemampuan dalam mengembangkan nilai solidaritas 80,6 %, bergaul dengan teman yang memiliki pandangan politik/kalangan yang berbeda 73 %, bekerjasama dengan teman yang memiliki pandangan politik/kalangan yang berbeda 76 % dan bekerjasama dengan teman yang berbeda ras, suku, agama dan budaya sebanyak 82 %.

Sedangkan proses sosialisasi politik tidak langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melalui pengembangan diri baik melalui

kegiatan ekstrakurikuler maupun melalui kegiatan organisasi yang berada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, PASKIBRA, PMR dan lain sebagainya. Dengan magang atau belajar di organisasi di sekolah, diharapkan nantinya akan dapat mempengaruhi dirinya ketika beraktifitas organisasai yang berhubungan dengan politik secara langsung. Siswa yang aktif di organisasi kesiswaan, banyak hal yang diperoleh dalam organisasi tersebut dan menjadikan pengalaman hidup. Mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, berdebat, adu argumen dan membuat keputusan. Kegitaan ini akan sangat membantu manakala siswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik yang sesungguhnya.

Oleh karena itu hasil dari proses sosialiasasi politik yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang diharapkan dapat mempengaruhi sikap siswa agar menjadi sisiwa yang memiliki karakter dan menjunjung tinggi nilai dan norma serta menjadi siswa yang memiliki sikap demokratis.

5.2 Implikasi Kebijakan

Menurut teori, bahwa Sekolah merupakan agen perubahan sosialisasi politik, memegang peranan yang sangat penting. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spriritual dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan.

SMA Negeri 2 Semarang telah mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak positif terhadap kebutuhan siswa dalam proses sosialisasi politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam membentuk generasi muda yang memiliki ketrampilan kewarganegaraan harus

mendapat dukungan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengambil peran guna mewujudkan generasi muda yang amanah sebagai pewaris generasi tua.

Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang memiliki tugas sebagai pelayanan masyarakat harus juga mengambil peran yang sinergi dengan program sekolah yang berkaitan dengan pendidikan politik remaja secara berkelanjutan. Potensi pemilih pemula yang pada umumnya ada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mestinya mendapat perhatian khusus sebagai sasaran program sosialisasi politik. Hal ini penting mengingat sudah seringkali dilaksanakan pemilu, baik pemilihan Gubernur, pemilu Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pada 18 April 2010 pemilihan walikota Semarang. Demikian juga dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan diharapkan memiliki program sosialisasi politik terhadap sekolah walaupun hanya dilaksanakan setiap menjelang pelaksanaan pemilihan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu saja banyak memiliki keterbatasan dan kelemahan yang terdapat didalamnya, walaupun peneliti sudah berupaya untuk mengungkapkan hasil penelitiannya. Penelitian ini kurang mempresentasikan keseluruhan siswa dalam proses sosialisasi politik yang dilakukan di sekolah terutama Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan positif bagi penulis agar lebih baik pada penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture*. Princeton, NJ: Princeton University Press
- Arikunto, Suharsini, 2009, *Manajemen Penelitian*, PT Rieneka Cipta, Jakarta
- Beck, Paul Allen. 1977. "The Role of Agents in Political Socialization," in Stanley Allen Renshon (ed.), *Handbook of Political Socialization Theory and Research*. New York: The Free Press: 115-142.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Budiyanto, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA*, Erlangga, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta
- Dan Nimmo, 2001, *Komunikasi Politik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Inglehart, R. and Norris, P. (2003) *Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change Around the World*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ellen, Ingrid Gould, Katherine O'Regan, Amy Ellen Schwartz, and Leanna Stiefel. 2002. "Immigrant Children and New York City Schools: Segregation and Its Consequences," *Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs*.
- Firmansyah, 2008, *Marketing Politik*, Yayasan Obor Jakarta
- Goulet, Eugenie Dostie. 2008. "The Role of the Teachers in the Development of Political Interest Among Teenagers". *Civic Education Workshop* University of Montreal June 17-19, 2008.
- Ijwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Angkasa, Bandung
- Kunandar, 2007, *Guru Profesional dalam Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, PT Raja Grafindo, Jakarta

- Langton, Kenneth P. dan M.Kent Jennings. 1968."Political socialization and the High School Civics Curriculum in the United States". American Political Science Review 62 (3): 852-867
- Listyarti, Retno, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Esis, Jakarta
- , 2003, *Kurikulum 2004 SMA*
- , 2008, *Kurikulum SMA Negeri 2 Semarang*
- Mas'oed, Mohtar, 1995, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Pres. Yogyakarta
- Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ngabiyanto, dkk, 2006, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, Rumah Indonesia, Unnes Semarang
- Norris, P. (ed.) (1999) *Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance*, Oxford: Oxford University Press
- Pradhanawati, Ari, 2009, *Pemilu dan Demokrasi*, FISIP Undip. Semarang
- Kristiadi, Josef, 1993, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih*, Universitas Gajahmada, Yogyakarta
- Raga Maram, Rafael, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sapiro, V. (2004) 'Not your parents' political socialization, Introduction for a new generation', *Annual Review of Political Science* 7: 1-23.
- Simon and Schuster. Putnam, R. (2000) *Bowling Alone. The Collaps and Revival of American Community*, New York
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, CV Alfabeta, Bandung
- Suprpto, dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 2005, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Torney-Purta, J. (2004) 'Adolescents' political socialization in changing contexts: an international study in the spirit of Nevitt Sanford', *Political Psychology* 25(3): 465-478.
- Tom Bottomore, 1992, *Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Williams, Melissa S. 2003. "Citizenship as Identity, Citizenship as Shared Fate, and the Functions of Multicultural Education," in Kevin McDonough and Walter Feinberg, *Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies*. Oxford: Oxford University Press: 208-247.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama Lengkap : SIHABUDIN ZUHRI, S.IP, S.Pd
N I M : D4B007035
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 24 Nopember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Wisma Prasetya IV/10 RT 05 RW 06
Perumahan Korpri, Kelurahan Sambirejo
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
Telpon (024) 6701743
- B. Riwayat Pendidikan :
1. Pendidikan Dasar (SD) Tahun 1973
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 1976
 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Upers Tahun 1983
 4. Universitas Terbuka (S1) Prodi Administarsi Negara Tahun 1999
 5. IKIP PGRI Semarang (S1) Prodi PPKn Tahun 2002
 6. Universitas Diponegoro (S2) Prodi Magister Ilmu Politik Tahun 2010
- C. Riwayat Pekerjaan :
1. Staf Tata Usaha SMPN 14 Smg 01-03-1982 s.d 17-09-1988
 2. Kepala Urusan Tata Usaha SMPN 14 Smg 17-09-1988 s.d 17-09-1999
 3. Kepala Urusan Tata usaha SMAN 15 Smg 17-09-1999 s.d 31-12-2000
 3. Kepala Seksi Trantib Kel.Panden Lamper 02-01-2001 s.d 30-06-2003
 4. Guru SMA Negeri 2 Semarang 30-06-2003 s.d sekarang
- D. Riwayat Diklat
1. Diklat Administrasi Kepegawaian Tahun 1999
 2. Diklat Teknis Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2002
 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV) Tahun 2003
 4. Diklat Kompetensi Guru Pkn Tahun 2008
 5. Diklat HAM bagi Guru PKn Tahun 2009
- E. Penghargaan

1. Satyalencana Karya Satya 10 tahun

Tahun 2001

F. Karya Ilmiah

1. Modul Pembelajaran PKn Klas 10

Tahun 2003

G. Data Keluarga

1. Nama Istri : Suwarsi, S.Pd

Guru SMPN 9 Semarang

2. Anak : Miftakhul Muslikhah Zuhri

Mahasiswa IKIP PGRI

Nur Muttaqien Zuhri

Pelajar SMAN 2 Smg

Makhfudz Sholahudin Zuhri

Pelajar SD

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

Pedoman wawancara :

1. Jelaskan alasan Anda. Mengapa kepercayaan Anda sangat rendah terhadap para politisi, baik ketika kampanye sebagai calon legislatif (janji kampanye dan mengumbar janji maupun saat menjadi anggota legislatif (memperjuangkan aspirasi rakyat)?

2. Jelaskan alasan Anda. Mengapa kepercayaan Anda sangat tinggi terhadap Pemerintah (upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menggunakan sumber daya yang ada)

3. Jelaskan alasan Anda. Mengapa Anda menyukai kegiatan organisasi sekolah yang banyak menyita waktu dan kadang-kadang juga meninggalkan pelajaran !

4. Jelaskan manfaat dan keuntungan aktif dalam organisasi sekolah, baik manfaat di dalam sekolah maupun di luar sekolah setelah menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara !



PROGRAM PASCA SARJANA (S-2)
MAGISTER ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**THE
FIELD
POLL**

KUESIONER PERANAN SEKOLAH
DALAM SOSIALISASI POLITIK
(Studi Penelitian Peranan Sekolah Dalam Sosialisasi
Politik Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Senarang)

Penelitian oleh **Sihabudin Zuhri** NIM D4B007035 untuk
menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro

PENTING !!!

Identitas Anda tidak akan dipublikasikan.

Jawaban yang Anda berikan dijamin kerahasiannya

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. N a m a : _____
2. K e l a s : _____
3. U m u r : _____ Tahun
4. Jenis kelamin : _____
5. Agama : _____
4. A l a m a t : _____
5. No. telp./HP : _____
6. Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Semarang

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Baca dan pahami pertanyaan-pertanyaan yang tersedia, setiap pertanyaan diikuti beberapa jawaban. Anda cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia.
2. Anda cukup memberi tanda pada pilihan jawaban. Dalam hal ini tidak ada jawaban benar dan salah, yang penting jawaban yang dipilih betul-betul sesuai dengan yang Anda alami dan rasakan sekarang.

3. Jika Anda ingin mengubah pilihan jawaban, Anda dapat memperbaiki jawaban tersebut dengan jalan memberi tanda silang kemudian berilah tanda baru pada jawaban yang baru.
4. Selamat mengerjakan dan kiranya tidak ada pertanyaan yang terlewat, terima kasih atas bantuan Anda.

III. DAFTAR PERTANYAAN

A. SOSIALISASI POLITIK

1. Apakah Anda sering menerima informasi tentang isu-isu politik dari keluarga ?

- Sering
 Kadang-kadang
 Tidak pernah

2. Apakah Anda pernah mendiskusikan isu-isu politik dengan keluarga ?

- Sering
 Kadang-kadang
 Tidak pernah

3. Apakah Anda sering dilibatkan pada pengambilan keputusan dalam keluarga ?

- Sering
 Kadang-kadang
 Tidak pernah

4. Apakah orang tua sering menanyakan pendapat Anda, dalam menentukan suatu masalah dalam keluarga ?

- Sering
 Kadang-kadang

Tidak pernah

5 Apakah Anda pernah mendiskusikan pelajaran yang berkaitan dengan politik di sekolah ?

- Sering
 Kadang-kadang
 Tidak pernah

6 Menurut Anda, bagaimanakah tingkat aktifitas organisasi di sekolah ?

- Baik
 Cukup
 Tidak baik

7 Apakah Anda menyukai tema-tema politik dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah ?

- Senang
 Kurang senang
 Tidak senang

8. Sebagai seorang siswa SMA yang sedang belajar politik, bagaimanakah cara memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi politik ?

No	Pertanyaan	Jawaban		
		S	KD	TP
1.	Membaca surat kabar			
2.	Mengikuti berita politik melalui media			
3.	Mendiskusikan isi berita politik			
4.	Mengikuti acara debat politik di Televisi			
5.	Menganalisa dan mengkritisi isi berita politik			

6.	Mengikuti kampanye partai politik/pilpres			
7.	Menggunakan hak pilih dalam pemilihan Ketua OSIS			
8	Terlibat dalam berbagai kegiatan politik/organisasi di sekolah			

S = Sering, KD = Kadang-kadang TP = Tidak Pernah

B. PEMBELAJARAN POLITIK

1. Saya memahami tentang tatacara memilih sebagai pemilih dalam pemilu maupun pilkada.

- Baik
- Cukup baik
- Kurang baik

2. Saya memiliki informasi tentang perkembangan politik di Indonesia

- Baik
- Cukup baik
- Kurang baik

3. Saya memahami isu-isu penting yang dihadapi negara Indonesia.

- Baik
- Cukup baik
- Kurang baik

4. Saya termotivasi untuk aktif dalam kegiatan sosial.

- Baik
- Cukup baik
- Kurang baik

5. Saya terdorong untuk melakukan berbagai kegiatan politik

- Baik
- Cukup baik
- Kurang baik

C. PENGETAHUAN POLITIK

1. Apakah Anda mengetahui partai pemenang Pemilu Legislatif 2009 ?
 - Mengetahui
 - Kurang mengetahui
 - Tidak mengetahui

2. Apakah Anda mengetahui nama-nama partai peserta Pemilu Legislatif 2009 ?
 - Mengetahui
 - Kurang mengetahui
 - Tidak mengetahui

3. Apakah Anda mengetahui partai pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2009 ?
 - Mengetahui
 - Kurang mengetahui
 - Tidak mengetahui

4. Apakah Anda mengikuti berita perkembangan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif (untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota?)
 - Sering
 - Kadang-kadang

Tidak pernah

5. Apakah Anda mengikuti berita perkembangan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009?

Sering

Kadang-kadang

Tidak pernah

6. Apakah Anda mengetahui fungsi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)?

Mengetahui

Kurang mengetahui

Tidak mengetahui

7. Apakah Anda mengetahui fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ?

Mengetahui

Kurang mengetahui

Tidak mengetahui

8. Apakah Anda mengetahui fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah)?

Mengetahui

Kurang mengetahui

Tidak mengetahui

9. Dalam menjalankan fungsinya Presiden dibantu oleh Kabinet/Menteri. Siapakah yang memilih dan mengangkat Kabinet/Menteri ?

Presiden

MPR

DPR

D. KEPERPIHAKAN POLITIK

1. Apakah Anda memiliki pilihan partai politik, jika Pemilihan Umum Legislatif diadakan saat ini ?

Ya

tidak

2. Jika jawaban Anda “ya”, apa alasannya?

Inisiatif sendiri (senang dengan tokoh politik, Visi misi, iklan politik)

Pengaruh keluarga

Pengaruh teman

3. Jika Pemilu Legislatif diadakan saat ini, partai manakah yang Anda pilih ?

Partai Demokrat (PD)

Partai Golkar (PG)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Amanat Nasional (PAN)

Yang lainnya (sebutkan)

E. NILAI-NILAI DEMOKRASI

No	Pertanyaan	Jawaban		
		S	KD	TP
1.	Saya mampu menjaga nilai persamaan			
2.	Saya mampu menghargai nilai perbedaan			
3.	Saya mampu menerapkan nilai toleransi			

4.	Saya mampu menjaga nilai kebebasan			
5.	Saya mampu mengembangkan nilai solidaritas			
6.	Saya bisa bergaul dengan teman yang memiliki pandangan politik /kalangan yang berdeda			
7.	Saya tidak keberatan untuk bekerjasama dengan teman yang memiliki pandangan politik/kalangan yang berbeda			
8.	Saya pernah bekerjasama dengan baik bersama teman yang berbeda ras, suku, agama dan budaya			

S = Sering, KD = Kadang-kadang, TP = Tidak Pernah

F. KEPERCAYAAN POLITIK

No	Pertanyaan	Jawaban		
		S	KD	TP
1.	Para politisi tidak pernah memenuhi janji kampanye mereka			
2.	Para politisi sering mengumbar janji agar namanya terpilih dalam pemilu			
3.	Pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk kepentingan pribadi para politisi			
4.	Para politisi memperjuangkan aspirasi rakyat			
5.	Para politisi telah berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat			
6.	Pemerintah berusaha keras untuk menghilangkan korupsi dan menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya			

S = Sering, KD = Kadang-kadang TP = Tidak Pernah

G. KETERLIBATAN POLITIK

1. Apakah Anda pernah ikut dalam kegiatan organisasi di sekolah maupun di luar sekolah?

Ya

Tidak

2. Jika jawaban “ya”, apakah Anda sering mengikuti rapat-rapat organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah ?

Sering

Kadang-kadang

Tidak pernah

3. Apakah Anda terlibat aktifitas sosial di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ?

Sering

Kadang-kadang

Tidak pernah

4. Apakah Anda menjadi anggota organisasi ekstrakurikuler di sekolah ?

Ya

Tidak

5. Apakah Anda menjadi anggota organisasi sosial di luar sekolah ?

Ya

Tidak

